

SKRIPSI

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

WAHIDA N



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**WAHIDA N
A31111292**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

disusun dan diajukan oleh

**WAHIDA N
A31111292**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Agustus 2015

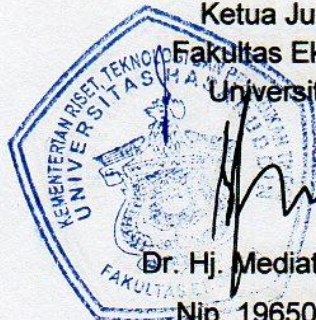
Pembimbing I


Dr. Hj. Haliah, SE., M.Si., Ak., CA
Nip. 19650731 199103 2 002

Pembimbing II

Muh. Achyar Ibrahim, SE., M.Si., Ak., CA
Nip. 19601225 199203 1 007

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA
Nip. 19650925 199002 2 001

SKRIPSI


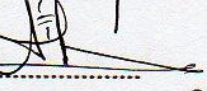
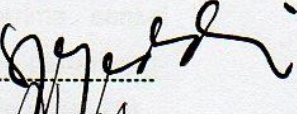
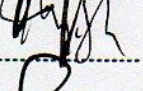
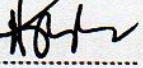
PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

disusun dan diajukan oleh

WAHIDA N
A31111292


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **20 Agustus 2015** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Haliah, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Muh. Achyar Ibrahim, SE., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syarifuddin, SE., M.Soc, Sc, Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Dr. Syamsuddin, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	4. 
5.	Drs. Syahrir, M.Si., Ak., CA	Anggota	5. 

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA

Nip. 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : WAHIDA N
NIM : A31111292
jurusan/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Juni 2015

Yang membuat pernyataan,



Wahida N
WAHIDA N

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini peneliti dedikasikan sepenuhnya kepada kedua orangtuaku Wahyuddin dan Hj. Nuraidah, tak cukup hanya sekedar ucapan 'terima kasih' untuk membasuh keringat dan tetesan air mata yang mengalir selama membesarkan ananda. Terima kasih buat mama tersayang yang membesarkan ananda dari kecil sampai sekarang. Terima kasih juga buat kakek yang selalu mengingatkan ananda dan juga buat kakak Wahid dan istrinya kakak Narti, kakak Wahab dan istrinya kakak Nisa atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Dr.Hj.Haliah,SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Drs.Muh.Achyar Ibrahim, SE., M.Si.,Ak.,CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Bapak Dr. Syarifuddin, SE., M.Soc, Sc, Ak., CA, Bapak Dr. Syamsuddin, SE., M.Si., Ak., CA, dan Bapak Drs. Syahrir, M.Si., Ak., CA selaku tim penguji. Terima kasih telah memberikan saran dan kritik sehingga skripsi ini mendekati sempurna.

Terima kasih kepada Bapak Drs.Muh.Achyar Ibrahim, SE., M.Si.,Ak.,CA selaku Penasehat Akademik peneliti atas bimbingannya bagi peneliti selama ini mulai dari semester awal hingga semester akhir.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas yang selama ini telah sabar membimbing dan memberikan ilmunya.

Terima kasih juga kepada pegawai Jurusan Akuntansi diantaranya: Pak Aso, Pak Ichal, Pak Tarru, dan pegawai akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis diantaranya: Pak Asmari, Pak Budi dan seluruh staf lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada semua kepala dan pegawai subbagian keuangan SKPD dan Masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih buat sahabatku tersayang Nasrah dan Kiki atas perhatiannya, doanya, canda tawanya dan dukungannya.

Terima kasih buat sahabat-sahabatku, Santi, Anti, Rudi, Bethy, Erdah, Susanti, Nona, Kak Dian dan banyak lagi yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih buat semua kebersamaannya, canda tawa, gosip, kerja sama, dan dukungan diberikan dalam proses pembuatan skripsi ini.

Terima kasih buat teman-teman angkatan 2011 akuntansi UNHAS untuk dukungan, dan bantuan yang diberikan sampai terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih buat UKM CATUR UNHAS untuk dukungan dan gangguannya selama ini. Buat Cuwil smoga cepat nyusul.

Terima kasih juga buat teman-temanku KKN Gel. 87 Desa Buntu Barana Kec. Curio Kab.Enrekang untuk dukungan, dan bantuan yang diberikan sampai terselesaikannya skripsi ini.

Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 22 Juni 2015

WAHIDA N

ABSTRAK

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

EFFECT OF FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ACCESSIBILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY NORTH KONAWE

Wahida N
Hj. Haliah
Muh. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan untuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Utara, selama tiga bulan dari Februari hingga April 2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *proporsionate stratified random sampling*; sampel ini kemudian ditentukan oleh 46 pimpinan dan pegawai dari SKPD dan 30 LSM. Untuk penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan alat program statistik, setelah uji asumsi klasik terpenuhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas wilayah pelaporan keuangan parsial atau bersama-sama positif berpengaruh pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kata kunci: Laporan keuangan, aksesibilitas, akuntabilitas

This research aims to empirically examine the effect of regional financial statement presentation and accessibility of financial statements for accountability in financial management. The research was conducted in Konawe Utara district, for three months from February to April 2015. The sampling method used is proportionate stratified random sampling; the sample is then determined by 46 managers and staff of SKPD and 30 NGOs. For this research the data analyzed using multiple linear regression with tools statistical program, after test the classical assumptions are met. The results of this research show that the presentation of the financial statements and the accessibility of the area of financial reporting partial or jointly positive effect on accountability in financial management.

Keywords: financial reports, accessibility, accountability

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 KegunaanTeoretis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	11
2.1.1 Teori Stewardship	11
2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan	12
2.1.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan	18
2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	24
2.4 Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Populasi dan Penentuan Sampel	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	31
3.5.1 Variabel Penelitian	31
3.5.2 Definisi Operasional Variabel	32
3.5.2.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah	32
3.5.2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	33
3.5.2.3 Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	31
3.6 Metode Pengumpulan Data	34
3.7 Analisis Data	35
3.7.1 Analisis Deskriptif	35

3.7.2 Uji Kualitas data	35
3.7.2.1 Uji Validitas data	35
3.7.2.2 Uji Reliabilitas data	36
3.7.3 Uji Penyimpangan Klasik	36
3.7.3.1 Uji Normalitas	36
3.7.3.2 Uji Multikolinearitas	36
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas	37
3.7.4 Pengujian Hipotesis	37
3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	38
3.7.4.2 Uji Statistik F	38
3.7.4.3 Uji Statistik t	38
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Data Penelitian	39
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Konawe Utara	39
4.1.1.1 Visi Kabupaten Konawe Utara	42
4.1.1.2 Misi Kabupaten Konawe Utara	43
4.1.1.3 Letak Geografis	45
4.1.2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara	46
4.1.2.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2012	46
4.1.2.2 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2013	46
4.1.3 Uji Validitas data	47
4.1.3.1 Penyajian Laporan Keuangan	47
4.1.3.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan	48
4.1.3.3 Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	49
4.1.4 Uji Reliabilitas	50
4.2 Deskripsi Data Secara Statistik	51
4.2.1 Tingkat Respon	51
4.2.2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	54
4.2.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	60
4.2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	62
4.3 Pengujian Asumsi Klasik	68
4.3.1 Uji Normalitas	68
4.3.1.1 Analisis Grafik	69
4.3.1.2 Analisis Statistik	70
4.3.2 Uji Multikolinearitas	70
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	71
4.4 Pengujian Hipotesis	72
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi	74
4.4.2 Uji Parsial dengan T-Test	75
4.4.2.1 Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1)	76
4.4.2.2 Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	77
4.4.3 Uji Simultan dengan F-Test	77
4.5 Pembahasan Penelitian	78
4.5.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara	78
4.5.1.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2012	78

4.5.1.2Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2013	82
4.5.2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	84
4.5.3Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	85
4.5.4 Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Memiliki Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	86
BAB V PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1).....	48
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2).....	48
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X3).....	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Reabilitas Masing-Masing Variabel.....	50
Tabel 4.5 Tingkat Responden Keseluruhan	51
Tabel 4.6 Latar Belakang Pendidikan	51
Tabel 4.7 Pendidikan Terakhir	52
Tabel 4.8 Jabatan	53
Tabel 4.9 Lama Bekerja	54
Tabel 4.10 Penyajian Laporan Keuangan (P1).....	55
Tabel 4.11 Penyajian Laporan Keuangan (P2).....	55
Tabel 4.12 Penyajian Laporan Keuangan (P3).....	56
Tabel 4.13 Penyajian Laporan Keuangan (P4).....	57
Tabel 4.14 Penyajian Laporan Keuangan (P5).....	57
Tabel 4.15 Penyajian Laporan Keuangan (P6).....	58
Tabel 4.16 Penyajian Laporan Keuangan (P7).....	59
Tabel 4.17 Penyajian Laporan Keuangan (P8).....	59
Tabel 4.18 Penyajian Laporan Keuangan (P9).....	60
Tabel 4.19 Aksesibilitas Laporan Keuangan (P1).....	61

Tabel 4.20 Aksesibilitas Laporan Keuangan (P2).....	51
Tabel 4.21 Aksesibilitas Laporan Keuangan (P3).....	62
Tabel 4.22 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P1)	63
Tabel 4.23 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P2)	63
Tabel 4.24 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P3)	64
Tabel 4.25 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P4)	64
Tabel 4.26 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P5)	65
Tabel 4.27 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P6)	66
Tabel 4.28 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P7)	66
Tabel 4.29 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P8)	67
Tabel 4.30 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P9)	67
Tabel 4.31 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P10).....	68
Tabel 4.32 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	70
Tabel 4.33 Coefficients ^a	71
Tabel 4.34 Variables Entered/Removed ^a	73
Tabel 4.35 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary ^b	74
Tabel 4.36 Hasil Uji T Coefficients ^a	75
Tabel 4.37 Hasil Uji F ANOVA ^a	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	24
Gambar 4.1 Histogram dengan Kurva Normal	69
Gambar 4.2 Kurva P-Plot Normal	69
Gambar 4.3 Diagram Scatterplot	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Biodata	95
Lampiran 2 Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011	96
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Per 31 Desember 2012 dan 2011	98
Lampiran 4 Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2012 dan 2011	99
Lampiran 5 Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012	100
Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Per 31 Desember 2013 dan 2012	102
Lampiran 7 Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2013 dan 2012	103
Lampiran 8 Kuesioner Penelitian	104
Lampiran 9 Statistik Deskriptif	109
Lampiran 10 Frekuensi Jawaban Responden.....	112
Lampiran 11 Uji Kualitas Data	118
Lampiran 12 Uji Asumsi Klasik	119
Lampiran 13 Uji Regresi Linear Berganda	121
Lampiran 14 Hasil Jawaban Responden.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian terhadap isu akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini yaitu: (1) Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara; (2) Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu konsekuensinya pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Steccolini (2002) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan), meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Pendapat senada dikemukakan oleh Ryan et al. (2002) dalam Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara

umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness* (pengambilan keputusan).

Mulgan (1997) dalam Sukhemi (2010) meneliti mengenai proses untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Proses akuntabilitas publik ternyata mengalami perjalanan yang sangat panjang. Hal ini dibuktikan dengan saluran untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang dimulai dari pelayan masyarakat kemudian menuju ke arah menteri, parlemen, pengadilan dan ombudsman baru menuju ke arah masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo,2006). Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada stakeholder adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah.

Ratna Amalia Safitri (2009) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Himmah Bandariy (2011) yang memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah (1) Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Mulyana (2006) menguji secara empiris apakah penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penyajian neraca daerah maupun aksesibilitas laporan keuangan keduanya berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pertentangan hasil beberapa penelitian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk

mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. (Halim, 2007).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sektor publik sedang mengalami perubahan mendasar, dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada *stakeholders*. Sebagai konsekuensinya, di berbagai negara,

pelaporan eksternal sedang ditransformasikan agar lebih konsisten dengan kebutuhan akuntabilitas baru (Steccolini: 2002).

Reformasi dan regulasi yang terkait dengan penyajian laporan keuangan daerah, ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas: Laporan perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah

Upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat diamati di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkungan pemerintah daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan perubahan yang cukup revolusioner.

Karakteristik kualitatif informasi dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), antara lain : relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas publik, dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus

mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan, 2010).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116. Ayat (4a) pasal 116 berbunyi, Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Pada kenyataannya, hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Tahun 2011 selama semester I Tahun 2012 dilakukan atas 426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah dan 4 LKPD tahun 2010. Hadi Poernomo menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011 secara umum menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding LKPD Tahun 2010 yang diperiksa pada semester I Tahun 2011. Jumlah LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat dari 34 menjadi 67. Meskipun terjadi peningkatan, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP tersebut masih relatif

kecil, yaitu baru 16% dari total LKPD. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP yaitu 77% dari total LKKL. Perbandingan opini antar pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah provinsi relatif lebih banyak memperoleh opini WTP kemudian diikuti secara berurutan oleh pemerintah kota dan kabupaten (Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI).

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Steccolini (2002) dalam Aliyah dan Nahar (2012)). Disamping melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, penyajiannya masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah ini dibuktikan pada pembentukan opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012. Namun, pada tahun anggaran 2013, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menunjukkan peningkatan opini dikarenakan pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah

melakukan pembenahan terhadap kelemahan dan ketidakpatuhan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan karakteristik laporan keuangan yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian LKPD (IHP BPK-RI, 2014). Opini WDP yang diberikan BPK tidak mengartikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan di Konawe Utara tidak membutuhkan koreksi, masih ada beberapa pemeriksaan yang perlu perbaikan utamanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa temuan pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara sejak tahun 2008 hingga 2013 (Rustam, 2014). Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah tidak mempublikasikan laporan keuangan daerahnya secara luas misalnya via internet atau media massa sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui atau mengaksesnya dengan mudah mengenai informasi (kinerja) keuangannya. Disamping itu, hal ini juga menunjukkan rendahnya akuntabilitas publik pada pemerintahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Menguji aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Menguji penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi pemerintah kabupaten Konawe Utara yaitu sebagai referensi dalam hal penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pihak lain yaitu sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Stewardship*

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009 dalam Haliah, 2012) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010 dalam Haliah, 2012) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi

sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust = amanah*) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward = manajemen*) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (*amanah = trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen

sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai : (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; (b) manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Kerangka konseptual PP No. 71 tahun 2010 karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, adapun karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut yaitu:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi

hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :
- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama.
4. Dapat dipahami, yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh:

- a. Ferdy van Beest, et, al., (2009) dan Jones, Gregory J., Jeannot Blanchet., (2000) yang menunjukkan temuan bahwa karakteristik kualitatif merupakan alat pengukuran yang valid dan dapat diandalkan untuk menilai kualitas informasi laporan keuangan.
- b. Wilkinson (2000:18) dalam Haliah (2012:31) menyatakan bahwa :
- “The value of information, and hence the soundness of decisions, can be affected by qualities that attach to the information. Useful information qualities are relevance, accuracy, timeliness, conciseness, clarity, quantifiability, consistency”.*
- c. Hilton, et, al., (2000:551) menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas sebagai berikut :
- “Three characteristics of information determine its usefulness for decision making; (a) Relevance, information is relevant if it is pertinent to a decision problem; (b) Accuracy, information that is pertinent to a decision problem must also be accurate; (c) Timeliness, relevant and accurate data are valuable only if they are timely, that is available in time for decision”.*
- d. Hongren, et, al., (2003:168) lebih menekankan pada informasi yang relevan dan akurat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan :
- “Information used for decision making would be perfectly relevant and accurate. Precise but irrelevant information is worthless for decision”.*

making. Imprecise but relevant information can be useful. Relevant is more crucial than precision in decision making”.

e. Wilson, et. al., (2001:994) dalam Haliah (2012:32) lebih lanjut menjelaskan :

“There are some factors that will assist in getting an improved reception from the leader: (1) report should be timely. A late report is almost as useless as no report at all, and (2) report must be accurate. Errors on reports result in a lack of confidence in them and in accounting departemen”.

Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan, 2010).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang

setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Atas laporan keuangan tersebut, berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI melakukan pemeriksaan untuk menilai Laporan Keuangan tersebut dalam hal 1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, dan 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah: (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan; (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan; (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya; (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (a) meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; (b) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas; (c) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (d) Memberikan

informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Diamond, 2002).

2.1.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly *et al*, 1992, dalam Rohman, 2009).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti

pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Kualitas Pemerintahan Daerah yang baik (*goodgovernance*) tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Namun, kualitas pemerintahan yang baik juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti *responsiveness, consessusorientation, equity efficiency,*

effectiveness dan *strategic vision*. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik menurut UNDP dan World Bank.

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi public antara lain, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Osborne (1992) dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang

bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa *eterpreneurship* pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.

Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi; Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah

berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 berikut mengemukakan penelitian terdahulu yang relevan.

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Steccolini (2002)	<i>Is The Annual Report An Accountability Medium? An Empirical Investigation Into Italian Local Governments</i>	Variabel independen adalah Penyajian Laporan Tahunan Pemerintah Daerah, sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Laporan Tahunan Pemerintah Daerah.	Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa laporan tahunan nampaknya digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan tidak jelas apakah laporan tersebut benar-benar dibaca atau tidak. Sementara itu, laporan tersebut tidak mempunyai peranan yang signifikan dalam pengkomunikasian kepada pengguna eksternal, sehingga peranan laporan keuangan aktual dan derajat akuntabilitas di pemda-pemda di Italia perlu dipertanyakan.
Budi Mulyana (2006)	Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah	Variabel independennya adalah Penyajian Neraca Daerah (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penyajian neraca

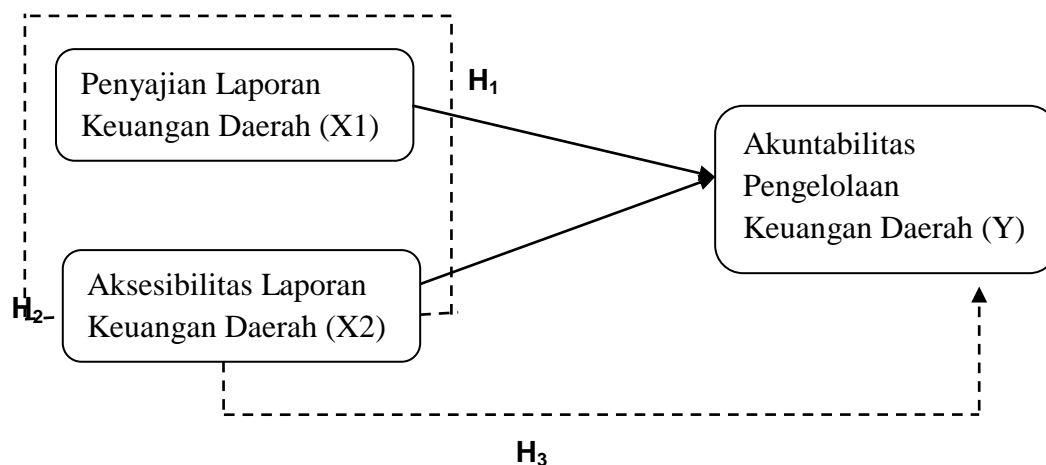
			daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Saufi Iqbal Nasution (2009)	Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara.	Variabel independennya adalah Penyajian Neraca SKPD (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah.	Secara parsial dan simultan, Penyajian Neraca SKPD (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah.	Variabel independennya adalah Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.
Sukhemi (2012)	Pengaruh Aksesibilitas Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Variabel independennya adalah Akseibilitas (X1) dan Tingkat Pengungkapan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).	Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan daerah mempunyai persepsi bahwa tingkat akuntabilitas suatu laporan keuangan tidak tergantung dari tingkat pengungkapan yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target termasuk kendalanya, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

			kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan lain.
Peggy Sande (2013)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)	Variabel independennya adalah Penyajian Laporan keuangan (X1) dan Aksebilitas (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).	Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: Penelitian Terdahulu diringkas

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

2.4.1. Hubungan penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang

diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemerintah Daerah bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Mulyana (2006) menyatakan penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis:

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.2. Hubungan aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Mulyono (2006) dalam Sukhemi (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Kadarmi (2008) dalam Sukhemi (2012) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampu menyajikan laporan keuangan tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyajikan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan. Berdasarkan atas

dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis:

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.3. Hubungan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jones et al (1995) dalam Mulyana (2006), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis:

H3: Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara, sebagai salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internal dan eksternal laporan keuangan pemerintah kabupaten Konawe Utara, yang dalam hal ini populasi yang dituju oleh peneliti adalah SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara dengan responden kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf dari masing-masing SKPD yang terlibat dalam proses proses pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat selaku stakeholder pemerintah merupakan pengguna potensial laporan keuangan Pemkab Konawe Utara. Mereka mempunyai rentang variabilitas pemahaman dan kepedulian akan laporan keuangan yang sangat tinggi, sehingga untuk meningkatkan kualitas data akan dipilih individu-individu atau kelompok yang representatif, yang dalam hal ini dipilih dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Penyampelan atas responden (pengguna laporan keuangan) dilakukan dengan teknik proporsionate stratified random sampling; yakni, suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak (heterogen), yang terdiri dari

beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda. Dalam menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi sebanyak 94 orang, maka digunakan rumus Slovin (Husein, 1999:59) seperti di bawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = Ukuran Populasi (sebanyak 94 orang)

e = Nilai kritis yang diinginkan sebesar 5%

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Tanggapan yang diberikan oleh responden berupa respon tertulis melalui kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner yang sebagian besar dikembangkan sendiri oleh peneliti, selebihnya mengadopsi dari kuisisioner Peggy Sande (2013) yang sebelumnya telah diuji tingkat validitas dan reabilitasnya dengan menggunakan SPSS versi 15. Kuisisioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti yaitu; pada demografi responden peneliti menjelaskan skor jawaban yang akan diberikan responden, penambahan dan pengurangan pernyataan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah dikarenakan kurang sesuai dengan indikator

yang digunakan oleh peneliti dan juga pada pernyataan penyajian laporan keuangan peneliti menambahkan indikator dapat dipahami disebabkan pada peneliti terdahulu tidak terdapat indikator tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan bersifat kuantitatif, terdiri atas data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan memberikan kuesioner kepada responden untuk memperoleh informasi tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten Konawe Utara.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert yaitu responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro, 2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

3.5.2.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian Laporan Keuangan (independent variabel) merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu;

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.5.2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan:

1. Terbuka di media massa
2. Mudah diakses
3. Ketersediaan informasi

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau

ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.5.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (dependent variabel) merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Variabel X1 Penyajian Laporan Keuangan	Penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Ordinal
Variabel X2 Aksesibilitas laporan keuangan	Kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipastakeholder.	1. Terbuka di media massa 2. Mudah diakses 3. Ketersediaan informasi	Ordinal

Variabel Y Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD.	1. Akuntabilitas kujurandan Akuntabilitas hukum 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan	Ordinal
--	---	--	---------

Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel menggunakan skala ordinal yang mengukur tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct diukur dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan penulisan ini, penulis mengambil cara dalam mendapatkan data dan informasi yang ada hubungannya dengan materi pembahasan. Adapun metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut

Kuesioner, artinya dengan membagikan daftar pertanyaan yang berhubungan variabel yang diteliti yaitu karakteristik laporan keuangan, serta kriteria-kriteria yang berkaitan dengan akuntabilitas laporan keuangan. Kuesioner diberikan dengan mengantar langsung dan dititipkan kepada staf di kantor, dengan mengadakan perjanjian pengambilannya setelah waktu yang dijanjikan tiba.

Studi kepustakaan (library research), suatu metode yang dilakukan dengan cara melihat, dan mempelajari berbagai bahan-bahan bacaan, seperti

buku-buku teoritis, makalah ilmiah, jurnal, dokumen dan laporan -laporan, termasuk berbagai peraturan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Dokumentasi data sekunder, merupakan metode pelengkap dalam mendukung hasil penelitian. Dokumentasi data sekunder merupakan dokumentasi yang berbentuk data permanen (hasil penelitian) yang berisi tentang segala sesuatu tentang catatan, rekaman suatu peristiwa dan objek atau aktivitas yang fakta, dan dianggap penting dan berharga.

3.7 Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan untuk mendapatkan bukti empirik sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Data di peroleh dari hasil kuisisioner, kemudian dikuantitatifkan agar dapat dianalisis secara statistik.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk dapat mempertanggungjawabkan ketelitian serta ketepatan kuisisioner yang dibagikan kepada responden. Alat ukur yang valid berarti alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Data yang dapat dilakukan analisis faktor bila nilai MSA di atas 0,5 (Kaiser & Rice, 1974) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki faktor loading di atas 0,40 (Chia, 1995).

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuisisioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuisisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, uji reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuisisioner-kuisisioner penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus *Cronbach's Alpha*. Kriteria dalam pengujian reliabilitas berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*, menurut Sekaran (2003 : 311), secara umum apabila didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,60 berarti buruk, sekitar 0,70 diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik.

3.7.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa tehnik analisis regresi yang digunakan dapat diinterpretasi atau hasil interpretasinya tidak bias. Model regresinya diharapkan *Best Linear Unbiased Estimation*.

3.7.3.1 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak.

3.7.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel bebas atau tidak.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. *Statistical Package For Sosial Science (SPSS)* akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear berganda. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan: Y	: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
X1	: Penyajian Laporan Keuangan Daerah
X2	: Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
a	: Konstanta
b1	: koefisien regresi dari X1
b2	: koefisien regresi dari X2
e	: kesalahan residual (error turn)

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Analisis Koefisien Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

3.7.4.2 Uji Statistik F

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah fix atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai sig yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah fix.

3.7.4.3 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$ (5%). Jika nilai t hitung $>$ t tabel dengan signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan di bawah 0,05.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Konawe Utara

Wilayah Kabupaten Konawe Utara ditinjau dari letak geografis berada pada daratan Sulawesi Bagian Tenggara, tepatnya pada bagian utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara administrasi, Kabupaten Konawe Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 pada tanggal 2 Juli 2007. Sebagai daerah yang baru dibentuk, ditunjuklah Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Konawe Utara yakni Aswad Sulaiman pada tanggal 17 Maret 2008. Pada tanggal 21 April 2011 dilantik Aswad Sulaiman dan Ruksamin oleh Gubernur Sulawesi Utara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara periode 2011 – 2015 setelah menunggu hampir 3 tahun lamanya sejak tahun 2007. Kabupaten Konawe Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Dengan pemekaran ini, Kabupaten Konawe Utara telah memiliki wilayah otonomi sendiri dengan ibu kota di Wanggudu. Wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe Utara juga mengalami pemekaran yang sebelumnya terdiri atas 4 (empat) Kecamatan menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu kecamatan Asera, Kecamatan Wiwinrano, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Sawa, Kecamatan Langgikimia, Kecamatan Molawe, dan Kecamatan Lembo, kemudian saat ini dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara terus mengalami pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 2010 – 2012. Tercatat pada tahun

2011, PDRB Kabupaten Konawe Utara tumbuh sebesar 9,01 persen. Meskipun tidak sebesar tahun 2011 pertumbuhan PDRB ini dilanjutkan pada tahun 2012 yaitu tumbuh sebesar 7,43 persen. Fenomena penurunan besaran pertumbuhan angka PDRB Kabupaten Konawe Utara di tahun 2012 cenderung disebabkan oleh tidak agresifnya kontribusi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian di banding 2 tahun sebelumnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan sektor pertanian yang memiliki *share* terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Konawe Utara. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Konawe Utara, peranan sektor pertanian masih tetap mendominasi dalam kurun waktu 2010-2012, yaitu tahun 2012 sebesar 60,37 persen.

Salah satu sektor peningkatan pendapatan daerah pada Kabupaten Konawe Utara adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor jasa perusahaan merupakan sektor yang dominan penyumbang PAD. Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian target pendapatan daerah secara kumulatif yang direncanakan pada APBD perubahan TA 2013 yang ditetapkan naik sebesar 10 % dari target pendapatan sebelum perubahan.

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memegang peranan penting dalam penerimaan PAD. Untuk memaksimalkan penerimaan pada sektor ini dibutuhkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah secara optimal dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat serta keseimbangan lingkungan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan antara lain peningkatan sarana dan prasarana pembangunan, rehabilitasi pasar-pasar dan rehabilitasi pos-pos PAD yang berpotensi dalam peningkatan penerimaan PAD, dan

meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dalam hal penerimaan pendapatan daerah. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah mengacu pada hasil analisa kegiatan optimalisasi PAD.

Komponen Belanja APBD Perubahan Kabupaten Konawe Utara TA 2013 terbagi atas belanja tidak langsung untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah secara rutin dan belanja langsung untuk membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindak lanjuti dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013. Alokasi tersebut diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan pada Kabupaten Konawe Utara dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah, maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Jumlah entitas akuntansi (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe utara terdiri dari:

1. 2 (dua) Sekretariat
2. 16 (enam belas) Dinas
3. 12 (dua belas) Badan
4. 3 (tiga) Kantor

5. 10 (sepuluh) Kecamatan

6. 10 (sepuluh) Kelurahan

Entitas tersebut mengelola dana terpisah sehingga masing-masing mempunyai DPA-SKPD. Untuk menatausahakan dana APBD yang dikelola oleh masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi, pada sekretariat, dinas dan badan telah dibentuk satuan PPK-SKPD yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengakuntasikan semua transaksi yang terjadi pada SKPD-nya masing-masing.
2. Menyusun Laporan Keuangan SKPD baik laporan semester maupun untuk laporan akhir.

4.1.1.1 Visi Kabupaten Konawe Utara adalah :

“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang sejahtera, maju dan tenteram, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang religius dan berbudaya dengan mengembangkan pemerintah yang bersih dan demokratis”.

Pada visi Kabupaten Konawe Utara 2012 – 2016 terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu :

1. **Sejahtera**, adalah kemampuan memberdayakan potensi internal dan eksternal, dalam hidup yang bahagia, tenteram, aman dan damai sehingga terpenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin.
2. **Persatuan**, adalah modal dasar dalam mendorong terciptanya iklim kehidupan sosial yang kondusif dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis, adil dan mandiri, guna mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. **Religius dan Berbudaya**, adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama guna meningkatkan dan mewujudkan etika dan moral yang

dilandasi dengan nilai-nilai agama dan budaya dalam interaksi kehidupan masyarakat sehari-hari.

4. **Pemerintah Yang Bersih dan Demokratis**, adalah system pemerintahan yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat, dalam perspektif *Good Governace* dan *Clean Governance*.

4.1.1.2 Misi

Guna mewujudkan visi Konawe Utara menjadi suatu realitas kehidupan politik, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, hukum dan ketentraman/ketertiban serta tatanan pemerintahan, maka visi tersebut diterjemahkan dalam misi yang akan diemban yaitu :

1. **Politik**, mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat dengan mengembangkan partisipasi politik masyarakat secara sehat dan rasional melalui partai politik serta memposisikan lembaga eksekutif dan legislatif dalam kemitraan yang sejajar
2. **Ekonomi**, mewujudkan infrastruktur yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat yang memungkinkan berlangsungnya kelancaran dan pengembangan ekonomi rakyat dengan mengembangkan sentra-sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan dengan distribusi faktor-faktor produksi secara proporsional. Mendorong secara luas tumbuhnya investasi dalam skala besar, menengah dan kecil pada berbagai sektor sehingga memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan. Mengoptimalkan potensi SDA yang dikelola dalam perspektif kemaslahatan masyarakat secara fungsional, akuntabilitas, transparan dan berkelanjutan yang ditunjang dengan pengembangan kualitas SDM.

3. **Sosial Budaya**, Mengembangkan perluasan akses dan daya tampung pendidikan serta pembangunan pendidikan yang bermutu baik TK, SD, SMA/Kejuruan dalam mewujudkan suatu tatanan community learning yaitu masyarakat yang terus menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baik melalui institusi pendidikan luar sekolah maupun melalui proses pendampingan instansi terkait dan LSM. Mewujudkan nilai-nilai agama dan pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota masyarakat. Mendorong dan mengembangkan reaktualisasi nilai-nilai budaya sebagai landasan untuk mewujudkan proses pembangunan yang beradab dan kontekstual. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang profesional.
4. **Hukum**, mewujudkan tertib hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan keadilan bagi semua anggota masyarakat.
5. **Ketentraman dan ketertiban**, memberikan jaminan yang kondusif terselenggaranya rasa aman, tenteram dan harmonis dalam kehidupan masyarakat disemua lini dan tatanan, sehingga memungkinkan terselenggaranya semua bentuk interaksi sosial, ekonomi, politik dan keagamaan secara tertib. Mendorong suasana persatuan dan keharmonisan kehidupan masyarakat sebagai prasarat yang diperlukan dalam proses pembangunan yang merupakan komitmen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. **Tatanan Pemerintahan**, Mengoptimalkan fungsi lembaga dan aparatur pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja mengedepankan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas dan

partisipatif guna mendorong percepatan pembangunan serta mewujudkan *Good Governance dan Clean Governance*.

4.1.1.3 Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian Selatan Khatulistiwa, terletak antara $3^{\circ} 54' 30''$ – $4^{\circ} 3' 11''$ LS dan membentang dari arah utara ke selatan antara $121^{\circ} 73'$ – $132^{\circ} 15'$ BT, dibatasi oleh Kabupaten Konawe, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Delinasinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Sulawesi tengah)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Konawe
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan perairan laut Banda dan laut Maluku
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan LAatoma Kabupaten Konawe dan Hutan Meluhu

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sebesar 500.339 ha atau 13.38 persen dari luas wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.

4.1.2 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara

4.1.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2012

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah aset sebesar Rp. 816,9 miliar (*unaudited*), kewajiban sebesar Rp. 7,4 miliar (*unaudited*), ekuitas dana sebesar Rp. 809,4 miliar (*unaudited*), realisasi pendapatan sebesar Rp. 511,8 miliar (*unaudited*), realisasi belanja sebesar Rp. 454,4 miliar (*unaudited*), dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 48,5 miliar (*unaudited*) serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 8,8 miliar (*unaudited*). Adapun rincian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2012 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas dapat dilihat pada **Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3**. Adapun opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2012 adalah **Tidak Memberikan Pendapat atau *Disclaimer***.

4.1.2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2013

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah aset sebesar Rp. 1,1 miliar (*unaudited*), kewajiban sebesar Rp. 20,2 miliar (*audited*), ekuitas dana sebesar Rp. 1,1 miliar (*audited*), realisasi pendapatan sebesar Rp. 581,7 miliar (*audited*), realisasi belanja sebesar Rp. 542,1 mmiliar (*audited*), dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 15,9 miliar (*audited*), serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 23,6 miliar (*audited*). Adapun rincian Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2013 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas dapat dilihat pada **Lampiran 4, Lampiran 5, dan Lampiran 6**. Adapun opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara TA 2013 adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

4.1.3 Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir kuisioner yang digunakan dalam penelitian. Analisis dilakukan terhadap semua butir-butir kuisioner dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.0, dimana batas angka kritis (α) adalah 0,05 (5%).

Pengujian validitas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid,
2. jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Berikut ini dibahas secara berturut-turut hasil uji validitas untuk masing-masing variabel:

4.1.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pertanyaan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)**

	R _{hitung}	R _{tabel}	Hasil
Pertanyaan 1	0,585	0,237	Valid
Pertanyaan 2	0,697	0,237	Valid
Pertanyaan 3	0,810	0,237	Valid
Pertanyaan 4	0,825	0,237	Valid
Pertanyaan 5	0,763	0,237	Valid
Pertanyaan 6	0,752	0,237	Valid
Pertanyaan 7	0,786	0,237	Valid
Pertanyaan 8	0,851	0,237	Valid
Pertanyaan 9	0,636	0,237	Valid

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 76 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-k$. dimana k merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. Jadi df untuk variabel Penyajian laporan Keuangan Daerah (X1) = $76-9 = 67$ dan r tabelnya 0,237. Berdasarkan perbandingan antara r hitung dan r tabel maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 9 butir pertanyaan yang valid yaitu butir 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9.

4.1.3.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pertanyaan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)**

	R _{hitung}	R _{table}	Hasil
Pertanyaan 1	0,852	0,227	Valid
Pertanyaan 2	0,877	0,227	Valid
Pertanyaan 3	0,824	0,227	Valid

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 76 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-k$. dimana k merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. Jadi df untuk variabel Assesibilitas Laporan Keuangan (X_2) = $76-3 = 73$ dan r tabelnya 0,227. Berdasarkan perbandingan antara r hitung dan r tabel maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 3 butir pertanyaan yang valid yaitu butir 1,2, dan 3.

4.1.3.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Setelah dilakukan pengukuran dengan cara mengoreksi skor pada setiap butir pertanyaan, maka hasil ujinya disajikan pada tabel 4.3 di bawah ini.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)**

	R_{hitung}	R_{tabel}	Hasil
Pertanyaan 1	0,418	0,238	Valid
Pertanyaan 2	0,493	0,238	Valid
Pertanyaan 3	0,413	0,238	Valid
Pertanyaan 4	0,472	0,238	Valid
Pertanyaan 5	0,572	0,238	Valid
Pertanyaan 6	0,493	0,238	Valid
Pertanyaan 7	0,548	0,238	Valid
Pertanyaan 8	0,617	0,238	Valid
Pertanyaan 9	0,653	0,238	Valid
Pertanyaan 10	0,502	0,238	Valid

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 76 orang, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-k$. dimana k merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. Jadi df untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) = $76-10 = 66$ dan r tabelnya 0,238. Berdasarkan perbandingan antara r hitung dan r tabel maka dapat dinyatakan

bahwa terdapat 10 butir pertanyaan yang valid yaitu butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10.

4.1.4 Reliabilitas

Koefisien reliabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pertanyaan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Perhitungan dilakukan dengan dibantu program SPSS 21.0. Adapun hasil reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil uji Reliabilitas Masing-masing Variabel

No	Variabel	Variabel Cronbach's Alpha	R _{tabel}	Hasil
1	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	0,901	0,60	Reliabel
2	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,804	0,60	Reliabel
3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,676	0,60	Reliabel

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Menurut Sekaran (2003:311) realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel penyajian Laporan Keuangan (X1), Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) dan Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa instrument yang terdapat pada ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel.

4.2 Deskripsi Data Secara Statistik

4.2.1. Tingkat Respon

Tingkat respon merupakan proporsi dari sampel yang melengkapi kuesioner. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang diterima dari responden maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5 Tingkat Respon Keseluruhan

Keterangan	Total
Kuesioner yang dikirim	76
Kuesioner yang kembali	76
Total kuesioner yang dapat digunakan	76 (100%)

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Tabel 4.6 Latar Belakang Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2	2.6	2.6	2.6
Adm. Pembangunan	1	1.3	1.3	3.9
Ekonomi	7	9.2	9.2	13.2
Ekonomi/Akuntansi	34	44.7	44.7	57.9
Hukum	6	7.9	7.9	65.8
Pemerintahan	1	1.3	1.3	67.1
Pendidikan	4	5.3	5.3	72.4
Pertanian	1	1.3	1.3	73.7
Sains	1	1.3	1.3	75.0
Sosial	9	11.8	11.8	86.8
Sosial Ekonomi Pembangunan	1	1.3	1.3	88.2
Ststistika	2	2.6	2.6	90.8
Teknik	7	9.2	9.2	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang mengisi kuesioner terdiridari 2 orang (2,6%) tidak mencantumkan latar belakang pendidikannya, 1 orang (1,3%) sebagai ADM. Pembangunan, 7 orang (9,2%) sebagai Ekonomi, 34 orang (44,7%) sebagai Ekonomi/Akuntansi, 6 orang (7,9%) sebagai Hukum, 1 orang (1,3%) sebagai Pemerintahan, 4 orang (5,3%) sebagai Pendidikan, 1 orang (1,3%) sebagai Pertanian, 1 orang (1,3%) sebagai Sains, 9 orang (11,8%) sebagai Sosial, 1 orang (1,3%) sebagai Sosial Ekonomi Pembangunan, 2 orang (2,6%) sebagai Statistika, 7 orang (9,2%) sebagai Teknik.

Tabel 4.7 Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Diploma (D3)	2	2.6	2.6	2.6
Valid Strata 1 (Sarjana)	53	69.7	69.7	72.4
Strata 2 (Master)	21	27.6	27.6	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 2 orang (2,6%) sebagai Diploma (D3), 53 orang (69,7%) sebagai Strata 1 (Sarjana), 21 orang (27,6%) sebagai Strata 2 (Master).

Tabel berikut menunjukkan tingkat keseluruhan responden yang dibagi berdasarkan jabatannya masing-masing :

Tabel 4.8 Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	28	36.8	36.8	36.8
Auditor	1	1.3	1.3	38.2
Bendahara	2	2.6	2.6	40.8
Kabag	1	1.3	1.3	42.1
Kabid	11	14.5	14.5	56.6
Kasie	15	19.7	19.7	76.3
Kasubbag	2	2.6	2.6	78.9
Kepala Badan	2	2.6	2.6	81.6
Kepala Dinas	2	2.6	2.6	84.2
Sekretaris	2	2.6	2.6	86.8
Staf	10	13.2	13.2	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 1 orang (1,3%) sebagai Auditor, 2 orang (2,6%) sebagai Bendahara Dispenda, 1 orang (1,3%) sebagai Kepala Bagian, 11 orang (14,5%) sebagai Kepala Bidang, 15 orang (19,7%) sebagai Kepala Seksi, 2 orang (2,6%) sebagai Kasubbag, 2 orang (2,6%) sebagai Kepala Badan, 2 orang (2,6%) sebagai Kepala Dinas, 2 orang (2,6%) sebagai Sekretaris, 10 orang (13,2%) sebagai Staf di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara dan 28 orang (36,8%) sebagai masyarakat tidak mencantumkan jabatannya.

Tabel 4.9 Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	3	3.9	3.9	3.9
≥ 21 Tahun	9	11.8	11.8	15.8
1 - 5 Tahun	31	40.8	40.8	56.6
Valid 11 - 15 Tahun	8	10.5	10.5	67.1
16 - 20 Tahun	5	6.6	6.6	73.7
6 - 10 Tahun	20	26.3	26.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 3 orang (3,9%) responden tidak mencantumkan lama bekerja, 9 orang (11,8%) responden bekerja selama ≥ 21 Tahun, 31 orang (40,8%) responden bekerja selama 1 – 5 Tahun, 20 orang (26,3%) responden bekerja selama 6 – 10 Tahun, 8 orang (10,5%) responden bekerja selama 11 – 15 Tahun, 5 orang (6,6%) responden bekerja selama 16 – 20 Tahun.

4.2.2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Sebaran data berdasarkan hasil survei kuesioner terhadap 76 orang responden, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang penyajian laporan keuangan daerah pada tabel-tabel di berikut :

Tabel 4.10 Penyajian Laporan Keuangan (P1)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
2	1	1.3	1.3	2.6
3	9	11.8	11.8	14.5
Valid 4	46	60.5	60.5	75.0
5	19	25.0	25.0	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan pertama (SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan), 1 orang (1,3%) dari jumlah responden menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,3%) dari responden menjawab tidak setuju, 9 orang (11,8%) menjawab ragu-ragu, 46 orang (60,5%) dari responden menjawab setuju, dan 19 orang (25,0%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.11 Penyajian Laporan Keuangan (P2)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.6	2.6	2.6
3	14	18.4	18.4	21.1
Valid 4	43	56.6	56.6	77.6
5	17	22.4	22.4	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kedua (SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan tepat waktu), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 2 orang (2,6%) menjawab tidak setuju, 14 orang (18,4%) dari jumlah responden menjawab ragu-ragu, 43 orang (56,6%) dari responden menjawab setuju, dan 17 orang (22,4%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.12 Penyajian Laporan Keuangan (P3)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	14	18.4	18.4	18.4
Valid 4	31	40.8	40.8	59.2
5	31	40.8	40.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan ketiga (laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan menjawab tidak setuju, 14 orang (18,4%) dari jumlah responden menjawab ragu-ragu, 31 orang (40,8%) dari responden menjawab setuju, dan 31 orang (40,8%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.13 Penyajian Laporan Keuangan (P4)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.6	2.6	2.6
3	14	18.4	18.4	21.1
Valid 4	33	43.4	43.4	64.5
5	27	35.5	35.5	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan keempat (Laporan Keuangan SKPD dapat membantu pengguna memperediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 2 orang (2,6%) dari jumlah responden menjawab tidak setuju, 14 orang (18,4%) menjawab ragu-ragu, 33 orang (43,4%) dari responden menjawab setuju, dan 27 orang (35,5%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.14 Penyajian Laporan Keuangan (P5)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.3	1.3	1.3
3	12	15.8	15.8	17.1
Valid 4	35	46.1	46.1	63.2
5	28	36.8	36.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kelima (informasi

yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,3%) dari jumlah responden menjawab tidak setuju, 12 orang (15,8%) menjawab ragu-ragu, 35 orang (46,1%) dari responden menjawab setuju, dan 28 orang (36,8%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.15 Penyajian Laporan Keuangan (P6)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
3	9	11.8	11.8	13.2
Valid 4	45	59.2	59.2	72.4
5	21	27.6	27.6	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan keenam (Apabila dilakukan terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh), 1 orang (1,3%) dari jumlah responden menjawab sangat tidak setuju, tidak ada responden yang menjawab tidak setuju, 9 orang (11,8%) menjawab ragu-ragu, 45 orang (59,2%) dari responden menjawab setuju, dan 21 orang (27,6%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.16 Penyajian Laporan Keuangan (P7)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
3	8	10.5	10.5	11.8
Valid 4	45	59.2	59.2	71.1
5	22	28.9	28.9	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Pada tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan ketujuh (informasi yang termuat dalam laporan keuangan SKPD dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya), 1 orang (1,3%) dari jumlah responden menjawab sangat tidak setuju, tidak ada responden menjawab tidak setuju, 8 orang (10,5%) menjawab ragu-ragu, 45 orang (59,2%) dari responden menjawab setuju, dan 22 orang (28,9%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.17 Penyajian Laporan Keuangan (P8)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
2	1	1.3	1.3	2.6
Valid 3	10	13.2	13.2	15.8
4	37	48.7	48.7	64.5
5	27	35.5	35.5	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kedelapan (laporan keuangan yang

disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya), 1 orang (1,3%) dari jumlah responden menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,3%) dari jumlah responden yang menjawab tidak setuju, 10 orang (13,2%) menjawab ragu-ragu, 37 orang (48,7%) dari responden menjawab setuju, dan 27 orang (35,5%) dari responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.18 Penyajian Laporan Keuangan (P9)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	7	9.2	9.2	9.2
Valid 4	45	59.2	59.2	68.4
5	24	31.6	31.6	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kesembilan (Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan SKPD dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 7 orang (9,2%) menjawab ragu-ragu, 45 orang (59,2%) dari responden menjawab setuju, dan 24 orang (31,6%) dari responden menjawab sangat setuju.

4.2.3. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Sebaran data dari 76 orang responden, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang aksesibilitas laporan keuangan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.19 Aksesibilitas Laporan Keuangan (P1)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	6	7.9	7.9	7.9
2	19	25.0	25.0	32.9
3	15	19.7	19.7	52.6
Valid 4	28	36.8	36.8	89.5
5	8	10.5	10.5	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.19 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan pertama (laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa), 6 orang (7,9%) dari responden menjawab sangat tidak setuju, 19 orang (25,0%) responden menjawab tidak setuju, 15 orang (19,7%) responden menjawab ragu-ragu dan 28 orang (36,8%) responden menjawab setuju dan 8 orang (10,5%) menjawab sangat setuju.

Tabel 4.20 Aksesibilitas Laporan Keuangan (P2)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
2	14	18.4	18.4	19.7
3	8	10.5	10.5	30.3
Valid 4	44	57.9	57.9	88.2
5	9	11.8	11.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.20 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kedua (memberikan

kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah), 1 orang (1,3%) responden yang menjawab sangat tidak setuju, 14 orang (18,4%) dari responden menjawab tidak setuju, 8 orang (10,5%) responden menjawab ragu-ragu, 44 orang (57,9%) menjawab setuju, 9 orang (11,8%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.21 Aksesibilitas Laporan Keuangan (P3)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	18	23.7	23.7	23.7
3	26	34.2	34.2	57.9
Valid 4	23	30.3	30.3	88.2
5	9	11.8	11.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.21 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan ketiga (masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (*website*)), tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju, 18 orang (23,7%) dari responden menjawab tidak setuju, 26 orang (34,2%) dari responden menjawab ragu-ragu, 23 orang (30,3%) responden menjawab setuju dan 9 orang (11,8%) responden menjawab sangat setuju.

4.2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sebaran data berdasarkan hasil survei kuesioner terhadap 76 orang responden, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.22 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P1)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
2	2	2.6	2.6	3.9
3	4	5.3	5.3	9.2
Valid 4	42	55.3	55.3	64.5
5	27	35.5	35.5	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.22 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan pertama (APBD disusun dengan pendekatan kinerja), 1 orang (1,3%) dari responden menjawab sangat tidak setuju, 2 orang (2,6%) menjawab tidak setuju, 4 orang (5,3%) menjawab ragu-ragu, 42 orang (55,3%) responden menjawab setujudan 27 orang (35,5%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.23 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P2)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.3	1.3	1.3
3	2	2.6	2.6	3.9
Valid 4	48	63.2	63.2	67.1
5	25	32.9	32.9	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.23 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kedua (Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan),

tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang (1,3%) responden menjawab tidak setuju, 2 orang (2,6%) responden menjawab ragu-ragu, 48 orang (63,2%) responden menjawab setuju dan 25 orang (32,9%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.24 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P3)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	8	10.5	10.5	10.5
Valid 4	34	44.7	44.7	55.3
5	34	44.7	44.7	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.24 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan ketiga (Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan menjawab tidak setuju, 8 orang (10,5%) menjawab ragu-ragu, 34 orang (44,7%) responden menjawab setuju dan 34 orang (44,7%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.25 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P4)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
4	39	51.3	51.3	51.3
Valid 5	37	48.7	48.7	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.25 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan keempat (Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu, 39 orang (51,3%) responden menjawab setuju dan 37 orang (48,7%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.26 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P5)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	13	17.1	17.1	17.1
4	51	67.1	67.1	84.2
5	12	15.8	15.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.26 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kelima (Ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan menjawab tidak setuju, 13 orang (17,1%) menjawab ragu-ragu, 51 orang (67,1%) responden menjawab setuju dan 12 orang (15,8%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.27 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P6)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
4	53	69.7	69.7	69.7
Valid 5	23	30.3	30.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.27 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan keenam (laporan keuangan SKPD direview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu, 53 orang (69,7%) menjawab setuju dan 23 orang (30,3%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.28 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P7)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	1	1.3	1.3	1.3
Valid 4	42	55.3	55.3	56.6
5	33	43.4	43.4	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.28 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan ketujuh (laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 1 orang (1,3%) responden menjawab ragu-ragu, 42 orang (55,3%) menjawab setuju dan 33 orang (43,4%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.29 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P8)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	5	6.6	6.6	6.6
Valid 4	46	60.5	60.5	67.1
5	25	32.9	32.9	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.29 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kedelapan (Dilakukannya *financial audit* terhadap laporan keuangan), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 5 orang (6,6%) dari responden menjawab ragu-ragu, 46 orang (60,5%) responden menjawab setuju dan 25 orang (32,9%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.30 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P9)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	13	17.1	17.1	17.1
Valid 4	46	60.5	60.5	77.6
5	17	22.4	22.4	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.30 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kesembilan (Indikator hasil kinerja yang akan dicapai di tetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 13 orang (17,1%) dari responden menjawab ragu-

ragu, 46 orang (60,5%) responden menjawab setuju dan 17 orang (22,4%) responden menjawab sangat setuju.

Tabel 4.31 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P10)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	5	6.6	6.6	6.6
3	13	17.1	17.1	23.7
Valid 4	35	46.1	46.1	69.7
5	23	30.3	30.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

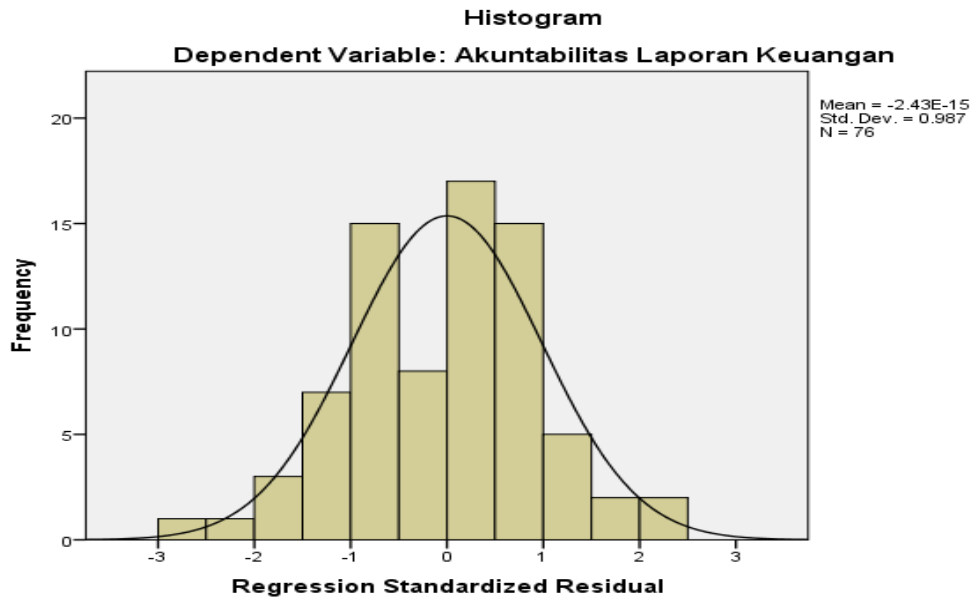
Berdasarkan tabel 4.31 diatas bisa terlihat bahwa dari 76 orang responden yang memberikan jawaban tentang pertanyaan kesepuluh (Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas), tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 5 orang (6,6%) dari responden menjawab tidak setuju, 13 orang (17,1%) dari responden menjawab ragu-ragu, 35 orang (46,1%) responden menjawab setuju dan 23 orang (30,3%) responden menjawab sangat setuju.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

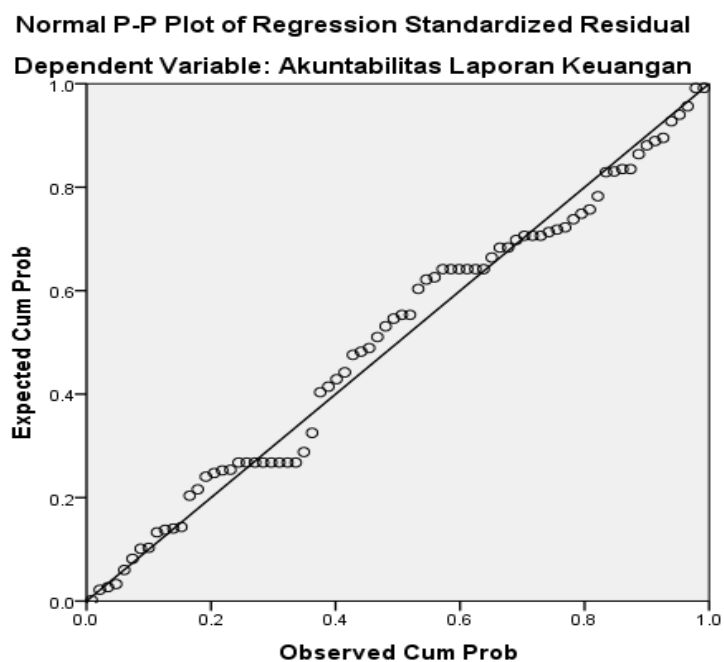
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal. Bila asumsi ini dilanggar maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam menguji normalitas data maka ada dua cara yang dapat digunakan yaitu :

4.3.1.1 Analisis Grafik



Gambar 4.1 Histogram dengan Kurva Normal

Pada gambar 4.1 diatas kurva akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki bentuk kurva yang cenderung ditengah tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dengan kata lain data pada variabel tersebut cenderung terdistribusi normal.



Gambar 4.2 Kurva P-Plot Normal

Pada gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa titik data menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal sehingga asumsi normalitas dapat terpenuhi.

4.3.1.2 Analisis Statistik

Tabel 4.32 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Akuntabilitas Laporan Keuangan	Penyajian Laporan keuangan	Aksesibilitas Laporan Keuangan
N		76	76	76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.4234	.4596	1.1199
	Std. Deviation	.03165	.06067	.29244
Most Extreme Differences	Absolute	.116	.151	.163
	Positive	.116	.151	.116
	Negative	-.072	-.109	-.163
Kolmogorov-Smirnov Z		1.011	1.316	1.422
Asymp. Sig. (2-tailed)		.258	.063	.055

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 4.32 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih besar atau sama dengan 5% (0,05) yaitu 0,258, 0,063 dan 0,055. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda.

Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor (VIF), korelasi pearson antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalues dan condition index (CI).

Tabel 4.33 Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Penyajian Laporan keuangan	.990	1.01
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.990	1.01

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

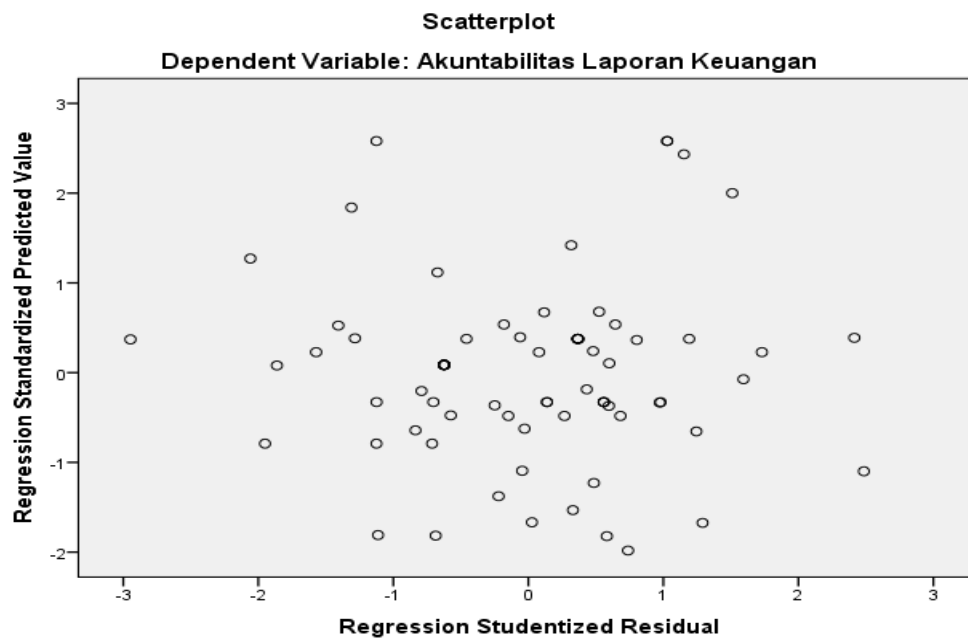
Sumber: hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.33 di atas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 5 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED

dimana dasar analisisnya adalah : (1) jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu dan teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas, dan (2) jika tidak ada pola yang jelas titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 4.3 Diagram Scatterplot

Berdasarkan grafik Scatterplot penelitian ini terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di bawah maupun di atas angka 0 sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan masukan variabel independennya (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan).

4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Regresi ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel penyajian

laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter, karena dengan metode enter seluruh variabel akan dimasukkan ke dalam analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data akan diolah dengan metode enter pada input alat bantu program statistik dan dihasilkan output pada tabel 4.34 berikut ini.

Tabel 4.34 Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan keuangan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

b. All requested variables entered.

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.34 *variables entered removed^a* analisis staitstik deskriptif yaitu sebagai berikut :

- 1) variabel yang dimasukkan kedalam persamaan adalah variabel independen yaitu Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2),
- 2) tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan (removed),
- 3) metode yang digunakan untuk memasukkan data yaitu metode enter.

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) dapat menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Tabel 4.35 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.645 ^a	.416	.400	.02450

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,645 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 64,5%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,416 yang berarti bahwa variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan) sebesar 41,6 % dan sisanya sebesar 58,4 % dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

4.4.2 Uji Parsial dengan T-Test

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X2), secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan (Y). Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel 4.36 di bawah ini.

Tabel 4.36 Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.251	.025		9.932	.000		
1 Penyajian Laporan keuangan	.245	.047	.470	5.228	.000	.990	1.011
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.053	.010	.493	5.486	.000	.990	1.011

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada kolom unstandardized coefficients bagian B diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,251 + 0,245X_1 + 0,053X_2 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi berganda di atas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta (a) = 0,251, menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan

keuangan yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka nilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah sebesar 0,251.

2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) = 0,245, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1) akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,245 satuan dengan anggapan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) adalah tetap/konstan.
3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) = 0,053, menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,053 satuan dengan anggapan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X_1) adalah tetap/konstan.
4. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

4.4.2.1 Variabel penyajian laporan keuangan daerah (X_1)

Berdasarkan tabel 4.36 diatas dapat dilihat bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki t hitung sebesar 5,228 dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 artinya signifikan. Signifikan disini berarti hipotesis diterima. Ini berarti penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.4.2.2 Variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2)

Berdasarkan tabel 4.36 diatas dapat dilihat bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki t hitung sebesar 5,486 dengan signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Ini berarti aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan adalah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.4.3 Uji Simultan dengan F-Test

Tabel 4.37 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.031	2	.016	26.051	.000 ^b
	Residual	.044	73	.001		
	Total	.075	75			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan keuangan

Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4.36 diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil f hitung sebesar 26,051 dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama

atau serempak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti dan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.5 Pembahasan Penelitian

4.5.1 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara

4.5.1.1 Analisis Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer*

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 43.A/LHP/XIX.KDR/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 2012 mendapat opini *Disclaimer* dikarenakan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012 sebesar Rp7.139.065.552,00. Berdasarkan catatan dan perhitungan yang diperoleh BPK, saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp8.603.442.168,27 yang diantaranya sebesar Rp8.324.307.960,27 adalah panjar dari TA 2008 s.d. 2011 sebesar Rp4.626.720.053,00 dan akumulasi kelebihan pembayaran sebesar

Rp3.697.587.907,27. Kas sebesar Rp8.324.307.960,27 tersebut tidak didukung keberadaan fisik uang sehingga tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

2. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp7.227.725.239,00. Berdasarkan catatan dan perhitungan yang diperoleh BPK, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp10.135.422.642,00 diantaranya sebesar Rp6.116.403.882,00 yang terdiri dari Sisa Uang Persediaan dari TA 2008 sampai dengan TA 2012 sebesar Rp5.762.180.421,00 dan Utang PFK sebesar Rp354.223.461,00 yang tidak didukung dengan keberadaan fisik uang sehingga tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
3. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2012 sebesar Rp725.100.630.191,00, diantaranya diketahui penyajian saldo awal sebesar Rp577.687.356.750,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan nilai perolehan serta penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada TA 2012 sebesar Rp24.698.982.605,00 tidak diungkap secara memadai dalam buku inventaris. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang

memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 tersebut.

4. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4.5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp71.331.915.477,00. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tidak melakukan pencatatan yang memadai atas aset lainnya tersebut. Aset Lainnya sebesar Rp71.331.915.477,00 tidak bisa dirinci dan tidak ada SKPD yang mengakui Aset Lainnya tersebut di Neraca SKPD. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp71.331.915.477,00 tersebut.
5. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2012 sebesar Rp5.536.124.280,27. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tidak dapat menyediakan secara lengkap data pemungutan dan penyetoran PFK dari TA 2009 sampai dengan TA 2012 sehingga berpengaruh signifikan terhadap hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada pemerintah pusat. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Utang PFK sebesar Rp5.536.124.280,27.
6. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.10 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Utang Belanja (Utang kepada Pihak Ketiga) per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.937.610.531,00. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tidak dapat menyediakan secara

lengkap data Utang Jangka Pendek Lainnya yang belum diselesaikan kewajiban pembayarannya. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut dapat lebih besar dan berpengaruh signifikan terhadap hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pihak Ketiga. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp1.937.610.531,00.

7. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah TA 2012 sebesar Rp5.601.624.998,00. Terhadap Nilai Lain-Lain PAD yang Sah tersebut tidak diungkapkan secara memadai pada Laporan Keuangan dan CALK serta tidak terdapat rincian atas penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tersebut. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp5.601.624.998,00.
8. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan kembali SiKPA TA 2011 yang sebelumnya sebesar minus Rp3.358.297.821,18 menjadi sebesar minus Rp23.865.293.957,27. Penggunaan SiKPA TA 2011 tersebut menyebabkan SiLPA TA 2012 sebesar Rp8.830.666.510,73. Angka SiLPA TA 2012 tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum memperhitungkan sisa anggaran TA 2011, saldo kas dan PFK sebenarnya. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas SiLPA tersebut.

Karena permasalahan yang diuraikan dalam paragraf di atas dan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan opini, dan BPK menolak memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 dan 2011.

4.5.1.2 Analisis Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16.A/LHP/XIX.KDR/05/2014 tanggal 5 Mei 2014, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 2013 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) dikarenakan sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 5.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 senilai Rp34,66 miliar. Dari saldo kas tunai tersebut senilai Rp1,01 miliar tidak didukung dengan fisik kas riil, dimana kas tersebut telah dikeluarkan oleh Kuasa BUD karena kelebihan pencairan SP2D dan kelebihan penyetoran PFK. Jika kas senilai 1,01 miliar tersebut tidak diakui sebagai Kas di Kas Daerah, maka nilai Kas di Kas Daerah menjadi senilai Rp33,65 miliar.
2. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 5.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 senilai Rp7,93 miliar. Dari saldo kas tunai tersebut senilai Rp3,05 miliar tidak didukung dengan fisik kas riil, dimana kas tersebut adalah sisa Uang Persediaan dari TA 2008 sampai dengan TA 2013 yang belum disetorkan ke kas daerah. Jika kas senilai 3,05

miliar tersebut tidak diakui sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran, maka nilai Kas di Bendahara Pengeluaran menjadi senilai Rp4,88 miliar.

3. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 5.1.17 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2013 senilai Rp1.055,16 miliar. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara belum menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya secara tuntas untuk melakukan inventarisasi Aset Tetap. Dengan demikian, penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Utara masih belum tertib dan informatif, diantaranya Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp29,70 miliar pada empat SKPD belum teridentifikasi dan informatif, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2,03 miliar pada dua SKPD tidak diungkap secara jelas dan lengkap pada dalam kartu inventaris barang, dan Tanah sebanyak 18 bidang dengan luas 117.500 m² masih disajikan dengan nilai Rp0,00. Penatausahaan Aset Tetap yang belum tertib dan informatif tersebut tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas nilai Aset Tetap dimaksud.
4. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 5.1.19 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2013 senilai Rp48,15 miliar. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara belum menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya secara tuntas untuk melakukan inventarisasi Aset Lainnya. Dengan demikian masih terdapat Aset Lainnya senilai Rp37,91 miliar yang tidak bisa diverifikasi ke dokumen dan bukti fisik barang hasil TA 2009 tersebut. Catatan dan dokumentasi yang belum tersedia tersebut tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Aset Lainnya tersebut.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyajian Kas di Kas Daerah senilai Rp1,01 miliar dan Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp3,05 miliar serta dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menatausahakan Aset Tetap dan Aset Lainnya secara tertib dan memadai, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tanggal 31 Desember 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.5.2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dikatakan signifikan karena nilai sig. variabel penyajian laporan keuangan daerah adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009), yang meneliti tentang pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penyajian neraca SKPD berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Jadi dengan adanya penyajian laporan keuangan yang baik, yang memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.5.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig. 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dimana apabila nilai sig. variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut signifikan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti dan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sande (2013) yang meneliti tentang Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012), yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. Serta, penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyana (2006) tentang pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan asset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan - kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.5.4 Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil uji simultan atas variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa dilihat dari nilai sig. 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dimana dengan nilai sig. yang lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut

memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. terbukti dan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam teorinya Shende dan Bennett mengisyaratkan diperlukannya tiga elemen penting dalam menegakkan reformasi di bidang pemerintahan (khususnya pengelolaan keuangan daerah), yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi pada prakteknya, transparansi dan akuntabilitas adalah tidak independen, sebab pada pelaksanaannya akuntabilitas memerlukan transparansi.

Steccolini (2002) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan) dapat dipertimbangkan sebagai media akuntabilitas. Dimana pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada stakeholder adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah (Mardiasmo, 2006).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 (pasal 103) dikatakan bahwa Informasi yang termuat dalam sistem informasi keuangan daerah sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 101 merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat yang dapat diketahui secara terbuka dan jujur melalui media tertentu.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengujian regresi, diketahui bahwa pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Mulyana (2006) tentang pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi kasus pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Nasution (2010) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan SKPD di Pemerintahan propinsi Sumatera Utara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Berdasarkan jawaban responden bahwa masih terdapat kelemahan dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten Konawe Utara. Dimana menurut masyarakat proses penyampaian, penyebarluasan dan akses masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Konawe Utara belum terlaksana secara baik.
3. Berdasarkan dari Hasil Pemeriksaan BPK yang didapatkan, pada LKPD TA 2012 terdapat 8 temuan yang menyebabkan BPK menolak memberikan opini (*Disclaimer*). Pada LKPD TA 2013 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dikarenakan laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.2 Saran

Laporan keuangan merupakan salah satu media penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian bisa diketahui bahwa laporan keuangan memberi kontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pentingnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Konawe Utara harus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya, terutama bagi para pengguna eksternal.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Konawe Utara diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan daerah yang dapat dibaca dan dipahami. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, pemerintah daerah kabupaten Konawe Utara diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui media massa, seperti surat kabar, radio, website, dan media lainnya yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah kabupaten Konawe Utara terhadap masyarakat.
2. Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta semua sumber daya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan semakin

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah bisa terlaksana dan pada akhirnya akan mampu meminimalisir praktek korupsi dan nepotisme oleh para aparatur sehingga clean government secara bertahap akan bisa terwujud.

3. Perlunya pemerintah daerah untuk memberi banyak kesempatan bagi pegawai yang sudah ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan keuangan daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara atau pertanyaan lisan. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.
5. Pembahasan yang berkaitan dengan akuntabilitas publik sangatlah luas, namun pada penelitian ini permasalahan hanya dianalisis secara kuantitatif. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan lebih rinci jika penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia (BPK-RI). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. (<http://www.bpk.go.id>, di akses pada tanggal 16 November 2014).
- Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia (BPK-RI). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. (<http://www.bpk.go.id>, di akses pada tanggal 16 November 2014).
- Bandariy, Himmah. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Chia. Y. M. 1995. *Decentralization, Management Accounting Systems (MAS) Information Characteristic and Their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore Study*, *Journal of Business Finance and Accounting*, Sept: 811-830.
- Diamond, Jack. 2002. *Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?*. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
- Donaldson. Lex, Davis James H, 1991, "Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covenance and Shareholders Return" *Australian Journal of Management*. Vol.16 iss. 1.
- Ferdy van Beest, Geert Braam, Suzanne Boelens, 2009, "Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics", Nijmegen Center for Economics (NiCE) Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen. <http://www.ru.nl/nice/workingpapers>.
- Haliah. 2012. "Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar.
- Hilton, Ronald, W., Michael W. Maher dan Frank H Selto, 2000, "Cost Manajemen, Strategies for Business Decision", Interntional Edition, McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hongren, Charles, T., George Foster dan Srikandi M. Datar, 2003, "Cost Accounting : A Managerial Emphasis", 11th Edition, Pretice-Hall International, Inc.
- Jones, D. B. 1985." The Needs of Users of Governmental Financial Reports". *Government Accounting Standards Board*.

- Kadarmi, T. (2008). *Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*, Skripsi S1. Yogyakarta: FEB UGM.
- Kaiser. H. F., dan J. Rice. (1974). *Little Jiffy, Mark IV, Educational and Psychological Measurement*. Vol.34, No.1, (Spring) : 111-117.
- Katz, Ellen. 2004. *Transparency in Government- How American Citizens Influence Public Policy*, *Journal of Accountancy*. Juni 2004, hal. 1-2
- LAN. 2000. *Akuntabilitas dan GoodGovernance*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2, No.1, pp.1-17.
- Mulyana, Budi. 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1. Mei 2006.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi SektorPublik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. Undang-undang No. 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rustam, 2014. *Bebas Disclaimer, Dewan Konut Apresiasi Pemda*, (online), (www.zonasultra.com, diakses pada tanggal 18 November 2014).
- Safitri, Ratna Amalia. 2009. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sagala, Marjuki. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Di Kabupaten Samosir*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?*. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin. September 2002.
- Sugiyono. 2006. *Metoda Penelitian Bisnis*. Cetakan kesembilan. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukhemi. 2010. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Volume 5, April: 85-100.
- _____. 2012. *Pengaruh Aksesibilitas Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. : 286-293.
- Warta Berita. (2012). Hasil Pemeriksaan BPK RI: "Opini WTP atas LKPD Meningkatkan" (online). (www.pewartaindonesia.com diakses pada tanggal 18 November 2012).
- <http://konaweutarakab.go.id>. Diakses pada tanggal 10 November 2014
- <http://www.bpk.go.id>.

BIODATA

Identitas Diri

Nama : WAHIDA NURMUTHMAINNAH
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 17 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat Rumah : Abdesir Perumahan Swadaya Mas Lr. II Makassar
No. HP : 085240586160
Alamat *E-mail* : idthlofa_111@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 1. SD Negeri 75 Surutanga Palopo 1998 – 2004
 2. SMP Negeri 1 Palopo 2004 – 2007
 3. SMA Negeri 3 Palopo 2007 – 2010
- Pendidikan Nonnformal
 1. TOEFL Preparation Course di Pusat Bahasa Universitas Hasanuddin
periode Maret – April 2015

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara UKM CATUR UNHAS Periode 2012-2013
2. Anggota Koordinator Minat dan Bakat UKM CATUR UNHAS Periode 2011-2012

Lampiran 2

Lampiran 1



LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA
NERACA (UNAUDITED)
 Per 31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2012	2011
ASET			
ASET LANCAR	4.1		
Kas Di Kas Daerah	4.1.1	7.139.065.552,00	9.261.165.933,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	4.1.2	169.989.000,00	175.978.860,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	4.1.3	7.227.725.239,00	5.829.992.581,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	4.1.4	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	4.1.5	0,00	0,00
Piutang Pajak	4.1.6	272.599.844,00	0,00
Piutang Retribusi	4.1.7	93.485.000,00	936.505.125,00
Piutang Dana Bagi Hasil	4.1.8	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Umum	4.1.9	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	4.1.10	0,00	0,00
Piutang Lain-lain - Lainnya	4.1.11	1.847.149.803,13	0,00
Persediaan	4.1.12	773.419.743,00	1.412.442.665,00
JUMLAH ASET LANCAR		17.523.434.181,13	17.616.085.164,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.2		
Investasi Non Permanen	4.2.1		
Pinjaman kepada perusahaan Negara	4.2.1.1	0,00	0,00
Pinjaman kepada perusahaan Daerah	4.2.1.2	0,00	0,00
Pinjaman kepada perusahaan Daerah lainnya	4.2.1.3	0,00	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara	4.2.1.4	0,00	0,00
Investasi Non Permanen lainnya	4.2.1.5	0,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Investasi permanen	4.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.2.2.1	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	4.2.2.2	0,00	0,00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	4.2.2.3	0,00	0,00
Investasi permanen lainnya	4.2.2.4	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		3.000.000.000,00	2.000.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		3.000.000.000,00	2.000.000.000,00
ASET TETAP	4.3		
Tanah	4.3.1	47.306.931.111,00	36.896.894.230,00
Peralatan dan Mesin	4.3.2	287.385.517.120,00	119.361.823.882,00
Gedung dan Bangunan	4.3.3	187.973.409.519,00	208.789.254.649,07
Jalan, Jaringan dan Instalasi	4.3.4	185.457.482.613,00	156.536.826.712,27
Aset Tetap Lainnya	4.3.5	16.608.293.828,00	15.657.955.135,18
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.3.6	368.996.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	4.3.7	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		725.100.630.191,00	537.242.754.608,52
DANA CADANGAN	4.4		
Dana Cadangan	4.4.1	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.5		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	4.5.1	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.5.2	0,00	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	4.5.3	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.5.4	91.350.000,00	91.350.000,00
Aset Lain-lain	4.5.5	71.240.565.477,00	71.930.824.796,00
JUMLAH ASET LAINNYA		71.331.915.477,00	72.022.174.796,00
JUMLAH ASET		816.955.979.849,13	628.881.014.568,52
KEWAJIBAN	5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.1	5.536.124.280,27	12.955.476.095,18
Utang Bunga	5.1.2	0,00	0,00
Utang Pajak	5.1.3	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang BANK	5.1.4	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Obligasi	5.1.5	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Pemerintah	5.1.6	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Pemerintah	5.1.7	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Pemerintah	5.1.8	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.9	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NERACA (UNAUDITED)
 Per 31 Desember 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Rupiah)


URAIAN	CATATAN	2012	2011
Utang Belanja (Utang kepada Pihak Ketiga)	5.1.10	1.937.610.531,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		7.473.734.811,27	12.955.476.095,18
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.2		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.2.1	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi	5.2.2	0,00	0,00
Utang Pemerintah Pusat	5.2.3	0,00	0,00
Utang Pemerintah Provinsi	5.2.4	0,00	0,00
Utang Pemerintah Kab/Kota	5.2.5	0,00	0,00
Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	5.2.6	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		7.473.734.811,27	12.955.476.095,18
EKUITAS DANA	6		
EKUITAS DANA LANCAR	6.1		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	6.1.1	8.830.666.510,73	2.135.682.418,82
Cadangan Untuk Piutang	6.1.2	2.213.234.647,13	936.505.125,00
Cadangan Untuk Persediaan	6.1.3	773.419.743,00	1.412.442.665,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (Utang Belanja)	6.1.4	-1.937.610.531,00	0,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	6.1.5	169.989.000,00	175.978.860,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		10.049.699.369,86	4.660.609.068,82
EKUITAS DANA INVESTASI	6.2		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	6.2.1	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	6.2.2	725.100.630.191,00	537.242.754.608,52
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang)	6.2.3	71.331.915.477,00	72.022.174.796,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	6.2.4	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		799.432.545.668,00	611.264.929.404,52
EKUITAS DANA CADANGAN	6.3		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	6.3.1	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA		809.482.245.037,86	615.925.538.473,34
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		816.955.979.849,13	628.881.014.568,52

Wanggudu, 5 Juli 2013

Bupati Konawe Utara

H. ASWAD SULAIMAN P

Lampiran 3

Lampiran 2					
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED) Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah)</p>					
URAIAN	Catatan	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2012	REALISASI 2012	%	REALISASI 2011
1	2	3	4	5	4
PENDAPATAN	1	518.989.047.025,00	511.800.919.213,00	98,61%	411.574.245.165,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.1	43.377.151.998,00	30.436.926.981,00	70,17%	7.647.158.443,00
Pendapatan Pajak Daerah		2.616.184.998,00	243.484.005,00	9,31%	196.013.500,00
Pendapatan Retribusi Daerah		36.630.967.000,00	23.796.130.084,00	64,96%	4.490.287.961,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		3.000.000.000,00	795.687.894,00	26,52%	449.070.372,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		1.130.000.000,00	5.601.624.998,00	495,72%	2.511.786.610,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.2	459.866.390.027,00	478.248.626.882,00	104,00%	403.728.086.722,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		445.368.915.418,00	472.777.769.783,00	106,15%	365.034.823.763,00
Dana Bagi Hasil Pajak	1.2.1	21.022.003.318,00	19.690.939.081,00	93,67%	15.229.229.516,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.2.2	3.084.672.100,00	21.697.645.702,00	703,40%	12.443.825.732,00
Dana Alokasi Umum	1.2.3	377.863.760.000,00	377.863.760.000,00	100,00%	289.541.668.515,00
Dana Alokasi Khusus	1.2.4	43.398.480.000,00	43.398.480.000,00	100,00%	47.820.100.000,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	1.2.5	10.986.696.100,00	10.126.945.000,00	92,17%	34.634.125.160,00
Dana Penyesuaian		10.986.696.100,00	10.126.945.000,00	92,17%	34.634.125.160,00
Transfer Pemerintah Provinsi	1.2.6	3.510.778.509,00	5.470.857.099,00	155,83%	4.059.137.799,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		3.510.778.509,00	5.470.857.099,00	155,83%	4.059.137.799,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.3	15.745.505.000,00	3.115.365.350,00	19,79%	199.000.000,00
Pendapatan Hibah		6.020.000.000,00	2.020.000.000,00	33,55%	-
Pendapatan Lainnya		9.725.505.000,00	1.095.365.350,00	11,26%	199.000.000,00
BELANJA	2	486.279.733.828,18	454.469.726.411,00	93,46%	390.923.086.159,18
BELANJA OPERASI	2.1	326.795.154.845,68	306.494.972.467,00	93,79%	218.696.697.867,00
Belanja Pegawai		182.587.316.084,18	173.931.336.853,00	95,26%	126.728.540.027,00
Belanja Barang dan Jasa		132.127.608.761,50	121.481.405.614,00	91,94%	82.635.607.840,00
Belanja Hibah		9.236.230.000,00	9.136.230.000,00	98,92%	7.772.050.000,00
Belanja Bantuan Sosial		1.150.000.000,00	852.000.000,00	74,09%	848.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		1.694.000.000,00	1.094.000.000,00	64,58%	712.000.000,00
BELANJA MODAL	2.2	158.134.578.982,50	147.718.981.623,00	93,41%	172.086.388.292,18
Belanja Tanah		4.960.448.779,00	4.955.048.779,00	99,89%	10.463.551.221,00
Belanja Peralatan dan Mesin		48.007.182.034,00	44.754.989.529,00	93,23%	36.511.924.941,00
Belanja Bangunan dan Gedung		58.776.588.580,50	56.154.957.847,00	95,54%	64.376.263.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		38.714.719.589,00	35.296.654.568,00	91,17%	52.224.676.826,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		7.675.640.000,00	6.557.330.900,00	85,43%	7.819.712.985,18
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	690.259.319,00
BELANJA TAK TERDUGA	2.3	1.350.000.000,00	255.772.321,00	18,95%	140.000.000,00
Belanja Tak Terduga		1.350.000.000,00	255.772.321,00	18,95%	140.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		32.709.313.196,82	57.331.192.802,00	175,27%	20.651.159.005,82
PEMBIAYAAN	3				
PENERIMAAN DAERAH		(3.358.297.821,18)	(23.865.293.957,27)	710,64%	(20.578.788.172,00)
Penggunaan Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA)		(3.358.297.821,18)	(23.865.293.957,27)	710,64%	(20.578.788.172,00)
PENGELUARAN DAERAH		36.067.611.018,00	24.635.232.334,00	68,30%	3.430.668.655,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		1.105.000.000,00	1.000.000.000,00	0,90	1.000.000.000,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		34.962.611.018,00	23.635.232.334,00	0,68	2.430.668.655,00
PEMBIAYAAN NETTO		(32.709.313.196,82)	(48.500.526.291,27)	148,28%	(24.009.456.827,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			8.830.666.510,73	0,0%	(3.358.297.821,18)

Wanggudu, 5 Juli 2013

Bupati Konawe Utara



H. ASWAD SULAIMAN P

Lampiran 4

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2012 dan 2011
 (dalam rupiah)

URAIAN	2012	2011
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	243.484.005,00	196.013.500,00
Hasil Retribusi Daerah	23.796.130.084,00	4.490.287.961,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	795.687.894,00	449.070.372,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.621.624.998,00	2.511.786.610,00
Bagi Hasil Pajak	19.690.939.081,00	15.229.229.516,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	21.697.645.702,00	12.443.825.732,00
Dana Alokasi Umum	377.863.760.000,00	289.541.668.515,00
Dana Alokasi Khusus	43.398.480.000,00	47.820.100.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10.126.945.000,00	34.634.125.180,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.470.857.099,00	4.059.137.799,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.095.365.350,00	199.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	511.800.919.213,00	411.574.245.165,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	173.931.336.853,00	126.728.540.027,00
Belanja Barang dan Jasa	121.481.405.614,00	82.635.607.840,00
Belanja Hibah	9.136.230.000,00	7.772.050.000,00
Belanja Bantuan Sosial	852.000.000,00	848.500.000,00
Belanja Bagi Bantuan Keuangan	1.094.000.000,00	712.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	255.772.321,00	140.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	306.750.744.788,00	218.836.697.867,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	205.050.174.425,00	192.737.547.298,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	4.955.048.779,00	10.463.551.221,00
Belanja Peralatan dan Mesin	44.754.989.529,00	36.511.924.941,00
Belanja Bangunan dan Gedung	56.154.957.847,00	64.376.263.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.296.654.668,00	52.224.676.826,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.557.330.900,00	7.819.712.985,18
Belanja Aset Lainnya	-	690.259.319,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	147.718.981.623,00	172.086.388.292,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	- 147.718.981.623,00	- 172.086.388.292,18
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Sikpa tahun lalu	- 23.865.293.957,27	- 20.578.788.172,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	- 23.865.293.957,27	- 20.578.788.172,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	23.635.232.334,00	2.430.668.665,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	24.635.232.334,00	3.430.668.665,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	- 48.500.526.291,27	- 24.009.456.837,00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	28.318.640.885,00	30.565.566.969,46
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	28.318.640.885,00	30.565.566.969,46
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	39.271.407.776,73	20.159.642.334,46
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	39.271.407.776,73	20.159.642.334,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	- 10.952.766.891,73	10.405.924.635,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	- 2.122.100.381,00	7.047.626.803,82
Saldo Awal Kas di Kas Daerah	9.261.165.933,00	3.103.431.927,00
Saldo Akhir Kas Di Kas Daerah	7.139.065.552,00	9.261.165.933,00
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	169.989.000,00	175.978.860,00
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran	7.227.725.239,00	5.829.992.581,00
Saldo Akhir Kas	14.536.779.791,00	15.267.137.374,00

Wanggudu, 5 Juli 2013

Bupati Konawe Utara

H. ASWAD SULAIMAN P

Lampiran 5

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
NERACA
 Per 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2013	2012
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Di Kas Daerah	5.1.1	34.655.356.920,77	8.678.296.974,27
Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.1.2	7.927.017.781,50	10.135.422.642,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	5.1.3	215.895.983,00	22.564.450,00
Piutang Pajak	5.1.4	0,00	0,00
Piutang Retribusi	5.1.5	7.803.756.350,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil	5.1.6	2.743.962.852,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Umum	5.1.7	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	5.1.8	0,00	0,00
Bagian Lancar TP	5.1.9	444.452.479,92	0,00
Bagian Lancar TGR	5.1.10	504.603.943,75	0,00
Piutang TGR	5.1.11	716.947.413,33	0,00
Piutang Lain-Lainnya	5.1.12	592.000.000,00	592.000.000,00
Persediaan	5.1.13	2.020.125.526,00	857.142.435,00
JUMLAH ASET LANCAR		67.624.118.260,12	20.286.428.601,27
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen	5.1.14	0,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Investasi permanen		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.15	4.127.500.000,00	3.000.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya	5.1.16	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		4.127.500.000,00	3.000.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		4.127.500.000,00	3.000.000.000,00
ASET TETAP	5.1.17		
Tanah	5.1.17.1	38.510.612.631,00	38.266.046.508,00
Peralatan dan Mesin	5.1.17.2	214.333.306.441,00	171.940.237.099,00
Gedung dan Bangunan	5.1.17.3	427.218.520.143,68	384.343.954.603,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.1.17.4	332.053.755.955,00	264.225.703.997,00
Aset Tetap Lainnya	5.1.17.5	25.016.534.060,00	19.579.221.950,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.1.17.6	18.028.949.662,32	0,00
Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		1.066.181.878.883,00	878.365.174.157,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.1.18	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.1.19		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	5.1.19.1	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.1.19.2	2.130.545.774,13	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.1.19.3	91.350.000,00	91.350.000,00
Aset Lain-lain	5.1.19.4	45.925.142.058,00	71.240.565.477,20
JUMLAH ASET LAINNYA		48.147.037.832,13	71.381.916.477,20
JUMLAH ASET		1.186.080.386.876,26	872.972.618.136,47



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
NERACA
 Per 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2013	2012
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.1.20	18.981.386.574,00	22.038.550.005,45
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja	5.1.21	1.144.508.617,00	1.139.388.481,00
Utang Pajak	5.1.22	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya (Iuran Askes)	5.1.24	83.393.289,40	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		20.209.288.480,40	23.177.938.486,45
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Pemerintah Pusat	5.1.25	0,00	0,00
Utang Pemerintah Provinsi	5.1.26	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		20.209.288.480,40	23.177.938.486,45
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR	5.1.27		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.28	23.600.988.128,27	(3.224.830.389,18)
Pendapatan yang Ditunggu-nantikan	5.1.29	215.895.983,00	22.564.450,00
Cadangan Untuk Piutang	5.1.30	12.805.723.039,00	592.000.000,00
Cadangan Untuk Persediaan	5.1.31	2.020.125.526,00	857.142.436,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	5.1.32	(1.227.901.906,40)	(1.139.388.481,00)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		37.414.830.788,72	(2.892.611.886,18)
EKUITAS DANA INVESTASI	5.1.33		
Dilvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	5.1.34	4.127.500.000,00	3.000.000.000,00
Dilvestasikan Dalam Aset Tetap	5.1.35	1.055.161.678.893,00	878.355.174.157,00
Dilvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	5.1.36	48.147.037.832,13	71.331.915.477,20
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		1.107.438.216.725,13	949.687.089.634,20
EKUITAS DANA CADANGAN			
Dilvestasikan Dalam Dana Cadangan	5.1.37	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA		1.144.851.047.484,85	948.794.577.848,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.165.090.535.975,25	972.872.516.135,47

Wanggudu, 05 Mei 2014

Bupati Konawe Utara

H. ASWAD SULAIMAN P

Lampiran 6

Lampiran 5




PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Catatan	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2013	REALISASI 2013	%	REALISASI 2012
1	2		3	4	5	6
1	PENDAPATAN		587.664.621.971,00	581.707.314.023,00	98,99%	509.585.966.872,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		22.927.746.188,00	22.998.466.541,00	100,31%	11.391.162.495,00
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.1	1.032.208.395,00	444.850.722,00	43,08%	243.484.005,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.2	14.538.843.000,00	16.217.939.385,00	111,55%	8.700.748.984,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.2.3	4.748.608.939,00	910.418.377,00	19,18%	795.687.894,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.2.4	2.610.287.854,00	5.425.458.077,00	207,85%	1.651.241.632,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER		539.660.413.885,00	539.612.449.304,00	100,35%	471.461.564.717,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		529.928.258.200,00	525.239.048.155,00	99,12%	484.645.342.268,00
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.5	24.041.882.911,00	18.878.024.968,00	78,52%	21.685.456.568,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.2.6	34.929.102.289,00	35.403.750.187,00	101,36%	21.697.645.702,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	5.2.7	417.340.323.000,00	417.340.323.000,00	100,00%	377.863.760.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	5.2.8	53.616.950.000,00	53.616.950.000,00	100,00%	43.988.480.000,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian	5.2.9	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi		7.790.231.035,00	12.049.584.499,00	154,68%	5.470.857.099,00
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.10	7.787.063.500,00	12.043.796.024,00	154,66%	5.465.435.593,00
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.2.11	3.107.535,00	5.788.475,00	182,74%	5.421.508,00
1.2.4.	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya		1.941.924.850,00	2.323.816.850,00	119,67%	1.345.365.350,00
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan	5.2.12	1.941.924.850,00	2.323.816.850,00	119,67%	1.345.365.350,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		25.076.461.898,00	19.096.398.178,00	70,68%	26.733.239.660,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	5.2.13	14.737.930.400,00	15.101.184.000,00	102,46%	12.146.945.000,00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	5.2.14	10.338.531.498,00	3.995.234.178,00	38,64%	14.586.294.660,00
2	BELANJA		580.979.582.694,27	542.122.353.185,00	93,31%	450.114.312.106,00
2.1.	BELANJA OPERASI		359.903.163.964,25	340.397.799.570,00	94,58%	304.628.163.372,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.2.15	188.847.136.726,62	177.636.156.874,00	94,06%	171.737.653.949,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.2.16	170.240.522.239,00	162.540.173.754,00	95,48%	121.944.655.418,00
2.1.5.	Belanja Hibah	5.2.17	0,00	0,00	0,00%	8.999.560.000,00
2.1.8.	Belanja Bantuan Sosial	5.2.18	0,00	0,00	0,00%	852.294.005,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	5.2.19	815.504.998,63	221.468.942,00	27,16%	1.094.000.000,00
2.2.	BELANJA MODAL		218.434.320.313,27	200.741.954.285,00	91,90%	145.466.148.734,00
2.2.1.	Belanja Tanah	5.2.20	8.320.000.000,00	6.611.152.494,00	79,46%	3.233.299.391,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.20	44.474.139.420,00	42.836.579.342,00	96,32%	44.862.854.445,00
2.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	5.2.20	86.142.701.959,00	76.502.550.381,00	88,81%	55.821.717.612,00
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.20	70.654.335.474,27	67.913.705.958,00	96,26%	34.990.946.388,00
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.20	8.943.143.460,00	6.877.966.110,00	76,91%	6.557.330.900,00
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	5.2.20	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA		2.642.098.416,75	982.599.330,00	37,19%	20.000.000,00
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	5.2.21	2.642.098.416,75	982.599.330,00	37,19%	20.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		6.685.039.276,73	39.584.960.838,00	592,14%	59.471.654.766,00
3	PEMBIAYAAN					
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		(5.685.039.276,73)	(14.983.972.709,73)	263,57%	(38.061.252.821,18)
3.1.1.	Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SIKPA) tahun lalu		(5.685.039.276,73)	(16.464.383.484,73)	289,61%	(38.061.252.821,18)
3.1.4.	Penerimaan Pembiayaan			1.480.410.755,00	0,00%	-
	Bunga Deposito Jaminan Reklamasi	5.2.22		1.478.610.755,00	0,00%	986.424.868
	Kelebihan Penerimaan Jaminan Reklamasi	5.2.22		1.500.000,00	0,00%	-
	Pengembalian Dana BOS	5.2.22		300.000,00	0,00%	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	24.635.232.334,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.2.23	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	1.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga			-	-	23.635.232.334,00
	PEMBIAYAAN NETTO		(6.685.039.276,73)	(15.983.972.709,73)	239,10%	(62.696.485.155,18)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		(0,00)	23.600.988.128,27	0,0%	(3.224.830.389,18)

Wanggudu, 05 Mei 2014
Bupati Konawe Utara

Lampiran 7

Lampiran 6		
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2013 dan 2012 (disajikan dalam rupiah)</p>		
URAIAN	2013	2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	444.650.722,00	243.484.005,00
Hasil Retribusi Daerah	16.217.939.365,00	8.700.748.964,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	910.418.377,00	795.687.894,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.475.458.077,00	1.651.241.632,00
Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)	18.878.024.968,00	21.685.456.566,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP)	35.403.750.187,00	21.697.645.702,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	417.340.323.000,00	377.863.760.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	53.616.950.000,00	43.398.480.000,00
Pendapatan Hibah	15.101.164.000,00	2.020.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.049.584.499,00	5.470.857.099,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.323.816.650,00	1.345.365.350,00
Pendapatan Lainnya	3.945.234.178,00	24.713.239.660,00
Jumlah Arus Kas Masuk	581.707.314.023,00	509.585.966.872,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	177.636.156.874,00	171.737.947.954,00
Belanja Barang dan Jasa	162.540.173.754,00	121.944.655.418,00
Belanja Hibah		8.999.560.000,00
Belanja Bantuan Sosial		852.294.005,00
Belanja Bagi Bantuan Keuangan	221.468.942,00	1.094.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	982.599.330,00	20.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	341.380.398.900,00	304.648.457.377,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	240.326.915.123,00	204.937.509.495,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Masuk</i>	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	6.611.152.494,00	3.233.299.391,00
Belanja Peralatan dan Mesin	42.836.579.342,00	44.862.854.445,00
Belanja Bangunan dan Gedung	76.502.550.381,00	55.821.717.612,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.913.705.958,00	34.990.946.386,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.877.966.110,00	6.557.330.900,00
Belanja Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	200.741.954.285,00	145.466.148.734,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(200.741.954.285,00)	(145.466.148.734,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
SILPA tahun lalu	0,00	0,00
Bunga Deposito Jaminan Reklamasi	1.478.610.755,00	986.424.868,00
Kelebihan Penerimaan Jaminan Reklamasi	1.500.000,00	0,00
Pengembalian Dana BOS	300.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.480.410.755,00	986.424.868,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		23.635.232.334,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.000.000.000,00	24.635.232.334,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	480.410.755,00	(23.648.807.466,00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31.995.150.323,18	28.806.000.654,00
Pengembalian Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	3.504.234.469,00	5.911.044.401,00
Jumlah Arus Kas Masuk	35.499.384.792,18	34.517.045.055,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.783.896.335,18	18.913.282.375,00
Sisa UP 2013 di Kas Bendahara Pengeluaran	2.570.901.646,50	2.717.589.343,00
	657.630.000,00	
Jumlah Arus Kas Keluar	42.012.427.981,68	21.630.871.718,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(6.513.043.189,50)	12.886.173.337,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	33.552.328.403,50	48.708.726.632,00
Saldo Awal Kas di Kas Daerah Selain SKTJM dan SK Pembebanan	1.103.028.517,27	40.030.429.657,73
Saldo Akhir Kas Di Kas Daerah	34.655.356.920,77	8.678.296.974,27
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	215.895.983,00	22.564.450,00
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran	7.927.017.781,50	10.135.422.642,00
Saldo Akhir Kas	42.798.270.685,27	18.836.284.066,27

Wanggudu, 5 Mei 2014
 Bupati Konawe Utara



Lampiran 8 : Kuesioner Penelitian

Pengantar Kuesioner

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Lampiran : Satu Berkas

Judul Skripsi : **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara**

Dengan hormat,

Terima kasih atas kehadiran Bapak, ibu, saudara/i untuk berpartisipasi dalam mengisi dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. Penelitian ini digunakan untuk menyusun skripsi dengan judul **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara**.

Untuk itu diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang sebenarnya demi membantu penelitian ini. Atas waktu dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Hormat Saya

Wahida N

KUESIONER PENELITIAN

A. Demografi Responden

Nama instansi :
 Nama :
 Umur : Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan Laki-Laki
 Tanggal pengisian :

Latar belakang pendidikan

- Ekonomi/akuntansi
- Hukum
- Teknik
- Sosial
- Lainnya.....

Pendidikan terakhir :
 SLTA/Sederajat
 Diploma (D3)
 Strata 1 (Sarjana)
 Strata 2 (Master)
 Strata 3 (Doctor)

Jabatan :
 Kepala Badan/Dinas/Instansi
 Sekretaris/Kabid/Kabag
 Kasubig/Kasubbag/Kasibdis/Kasie
 Lainnya:.....

Terima kasih Bapak/Ibu, telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (X).

Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 sampai dengan 5, di mana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/ Pernyataan. Skor jawaban adalah sebagai berikut:

Keterangan	(SS) Sangat Setuju	(S) Setuju	(RR) Ragu-Ragu	(TS) tidak setuju	(STS) Sangat Tidak Setuju
Skor	5	4	3	2	1

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	APBD disusun dengan pendekatan kinerja					
2	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					
3	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.					
4	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah					
5	Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.					
6	Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK					
7	Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada					

	BPK untuk dilakukan pemeriksaan					
8	Dilakukannya <i>financial audit</i> terhadap laporan keuangan daerah					
9	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD					
10	Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas					

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

No	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).					
2	SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu.					
3	Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu.					
4	Laporan keuangan SKPD menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini					
5	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					

6	Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
7	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan SKPD dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
8	Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.					
9	Informasi dari laporan keuangan SKPD yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna					

AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN

No	PERNYATAAN	SS	S	RR	TS	STS
1	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.					
2	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.					
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (<i>website</i>)					

Lampiran 9 : Statistik Deskriptif

Instansi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
BKD	7	9.2	9.2	9.2
BPKAD	15	19.7	19.7	28.9
Dinas Pekerjaan Umum	3	3.9	3.9	32.9
Dinas Pendapatan	1	1.3	1.3	34.2
Dinas Perindangkop	2	2.6	2.6	36.8
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	1	1.3	1.3	38.2
Dinas Perkebunan dan Hurtikultura	1	1.3	1.3	39.5
DISPENDA	5	6.6	6.6	46.1
Inspektorat Daerah	9	11.8	11.8	57.9
Masyarakat	30	39.5	39.5	97.4
Sekretariat DPRD	2	2.6	2.6	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
22 Tahun	2	2.6	2.6	2.6
24 Tahun	11	14.5	14.5	17.1
25 Tahun	1	1.3	1.3	18.4
26 Tahun	1	1.3	1.3	19.7
27 Tahun	3	3.9	3.9	23.7
28 Tahun	1	1.3	1.3	25.0
29 Tahun	3	3.9	3.9	28.9
30 Tahun	3	3.9	3.9	32.9
31 Tahun	1	1.3	1.3	34.2
32 Tahun	7	9.2	9.2	43.4
33 Tahun	3	3.9	3.9	47.4
34 Tahun	5	6.6	6.6	53.9
35 Tahun	1	1.3	1.3	55.3
36 Tahun	3	3.9	3.9	59.2

37 Tahun	3	3.9	3.9	63.2
38 Tahun	5	6.6	6.6	69.7
40 Tahun	5	6.6	6.6	76.3
41 Tahun	1	1.3	1.3	77.6
42 Tahun	4	5.3	5.3	82.9
43 Tahun	1	1.3	1.3	84.2
45 Tahun	1	1.3	1.3	85.5
46 Tahun	1	1.3	1.3	86.8
47 Tahun	1	1.3	1.3	88.2
48 Tahun	2	2.6	2.6	90.8
49 Tahun	1	1.3	1.3	92.1
50 Tahun	1	1.3	1.3	93.4
52 Tahun	1	1.3	1.3	94.7
54 Tahun	1	1.3	1.3	96.1
55 Tahun	1	1.3	1.3	97.4
56 Tahun	1	1.3	1.3	98.7
60 Tahun	1	1.3	1.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	48	63.2	63.2	63.2
Valid Perempuan	28	36.8	36.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Latar Belakang Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Adm. Pembangunan	2	2.6	2.6	2.6
Valid Ekonomi	7	9.2	9.2	13.2
Valid Ekonomi/Akuntansi	34	44.7	44.7	57.9
Valid Hukum	6	7.9	7.9	65.8
Valid Pemerintahan	1	1.3	1.3	67.1
Valid Pendidikan	4	5.3	5.3	72.4
Valid Pertanian	1	1.3	1.3	73.7

Sains	1	1.3	1.3	75.0
Sosial	9	11.8	11.8	86.8
Sosial Ekonomi Pembangunan	1	1.3	1.3	88.2
Ststistika	2	2.6	2.6	90.8
Teknik	7	9.2	9.2	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Diploma (D3)	2	2.6	2.6	2.6
Strata 1 (Sarjana)	53	69.7	69.7	72.4
Strata 2 (Master)	21	27.6	27.6	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	28	36.8	36.8	36.8
Auditor	1	1.3	1.3	38.2
Bendahara	2	2.6	2.6	40.8
Kabag	1	1.3	1.3	42.1
Kabid	11	14.5	14.5	56.6
Kasie	15	19.7	19.7	76.3
Kasubbag	2	2.6	2.6	78.9
Kepala Badan	2	2.6	2.6	81.6
Kepala Dinas	2	2.6	2.6	84.2
Sekretaris	2	2.6	2.6	86.8
Staf	10	13.2	13.2	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	3	3.9	3.9	3.9
≥ 21 Tahun	9	11.8	11.8	15.8
1 - 5 Tahun	30	39.5	39.5	55.3
Valid 1 - 5 Tahunn	1	1.3	1.3	56.6
11 - 15 Tahun	8	10.5	10.5	67.1
16 - 20 Tahun	5	6.6	6.6	73.7
6 - 10 Tahun	20	26.3	26.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Lampiran 10: Frekuensi Jawaban Responden

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P1)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
2	2	2.6	2.6	3.9
3	4	5.3	5.3	9.2
Valid 4	42	55.3	55.3	64.5
5	27	35.5	35.5	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P2)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.3	1.3	1.3
3	2	2.6	2.6	3.9
Valid 4	48	63.2	63.2	67.1
5	25	32.9	32.9	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P3)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	8	10.5	10.5	10.5
4	34	44.7	44.7	55.3
5	34	44.7	44.7	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P4)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	39	51.3	51.3	51.3
5	37	48.7	48.7	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P5)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	13	17.1	17.1	17.1
4	51	67.1	67.1	84.2
5	12	15.8	15.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P6)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	53	69.7	69.7	69.7
5	23	30.3	30.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P7)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	1	1.3	1.3	1.3
4	42	55.3	55.3	56.6
5	33	43.4	43.4	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P8)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	5	6.6	6.6	6.6
Valid 4	46	60.5	60.5	67.1
5	25	32.9	32.9	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P9)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	13	17.1	17.1	17.1
Valid 4	46	60.5	60.5	77.6
5	17	22.4	22.4	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (P10)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	5	6.6	6.6	6.6
3	13	17.1	17.1	23.7
Valid 4	35	46.1	46.1	69.7
5	23	30.3	30.3	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan (P1)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
2	1	1.3	1.3	2.6
Valid 3	9	11.8	11.8	14.5
4	46	60.5	60.5	75.0
5	19	25.0	25.0	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan (P2)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.6	2.6	2.6
3	14	18.4	18.4	21.1
Valid 4	43	56.6	56.6	77.6
5	17	22.4	22.4	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan (P3)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	14	18.4	18.4	18.4
Valid 4	31	40.8	40.8	59.2
5	31	40.8	40.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan (P4)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2.6	2.6	2.6
3	14	18.4	18.4	21.1
Valid 4	33	43.4	43.4	64.5
5	27	35.5	35.5	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan (P5)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1.3	1.3	1.3
3	12	15.8	15.8	17.1
Valid 4	35	46.1	46.1	63.2
5	28	36.8	36.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan (P6)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
3	9	11.8	11.8	13.2
Valid 4	45	59.2	59.2	72.4
5	21	27.6	27.6	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan (P7)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
3	8	10.5	10.5	11.8
Valid 4	45	59.2	59.2	71.1
5	22	28.9	28.9	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan (P8)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
2	1	1.3	1.3	2.6
Valid 3	10	13.2	13.2	15.8
4	37	48.7	48.7	64.5
5	27	35.5	35.5	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Penyajian Laporan Keuangan (P9)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	7	9.2	9.2	9.2
Valid 4	45	59.2	59.2	68.4
5	24	31.6	31.6	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Aksesibilitas Laporan Keuangan (P1)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	6	7.9	7.9	7.9
2	19	25.0	25.0	32.9
3	15	19.7	19.7	52.6
4	28	36.8	36.8	89.5
5	8	10.5	10.5	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Aksesibilitas Laporan Keuangan (P2)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	1.3	1.3	1.3
2	14	18.4	18.4	19.7
3	8	10.5	10.5	30.3
4	44	57.9	57.9	88.2
5	9	11.8	11.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Aksesibilitas Laporan Keuangan (P3)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	18	23.7	23.7	23.7
3	26	34.2	34.2	57.9
4	23	30.3	30.3	88.2
5	9	11.8	11.8	100.0
Total	76	100.0	100.0	

Lampiran 11: Uji Kualitas Data

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	76	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	76	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

1. Uji Reailitas

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.676	10

2. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.901	9

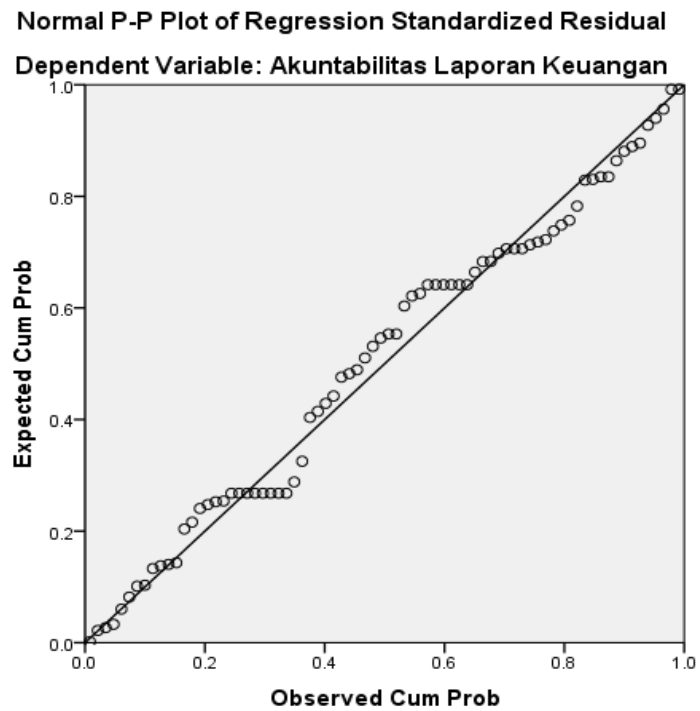
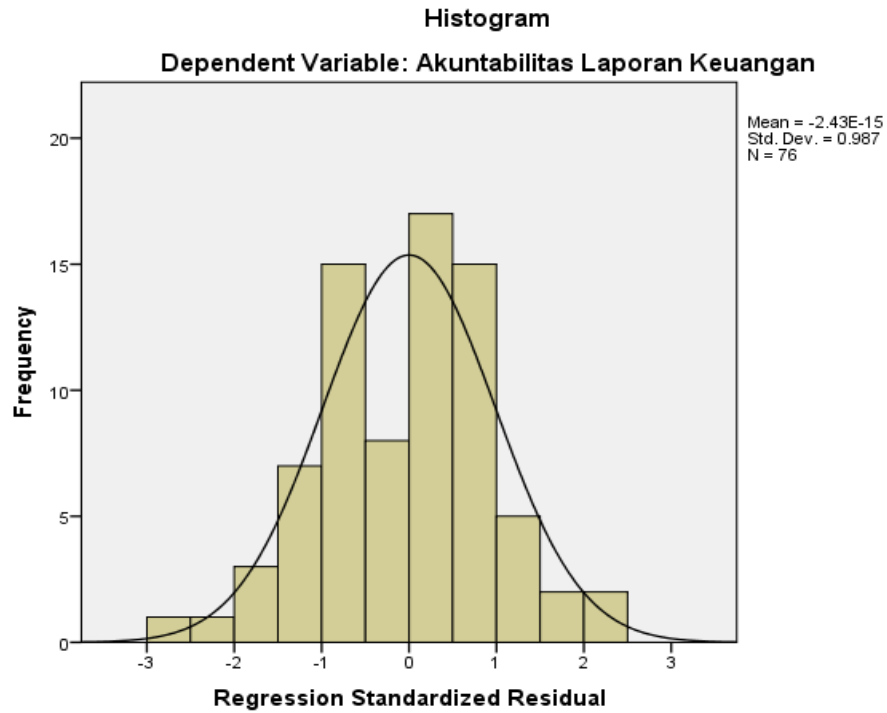
3. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.804	3

Lampiran 12: Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

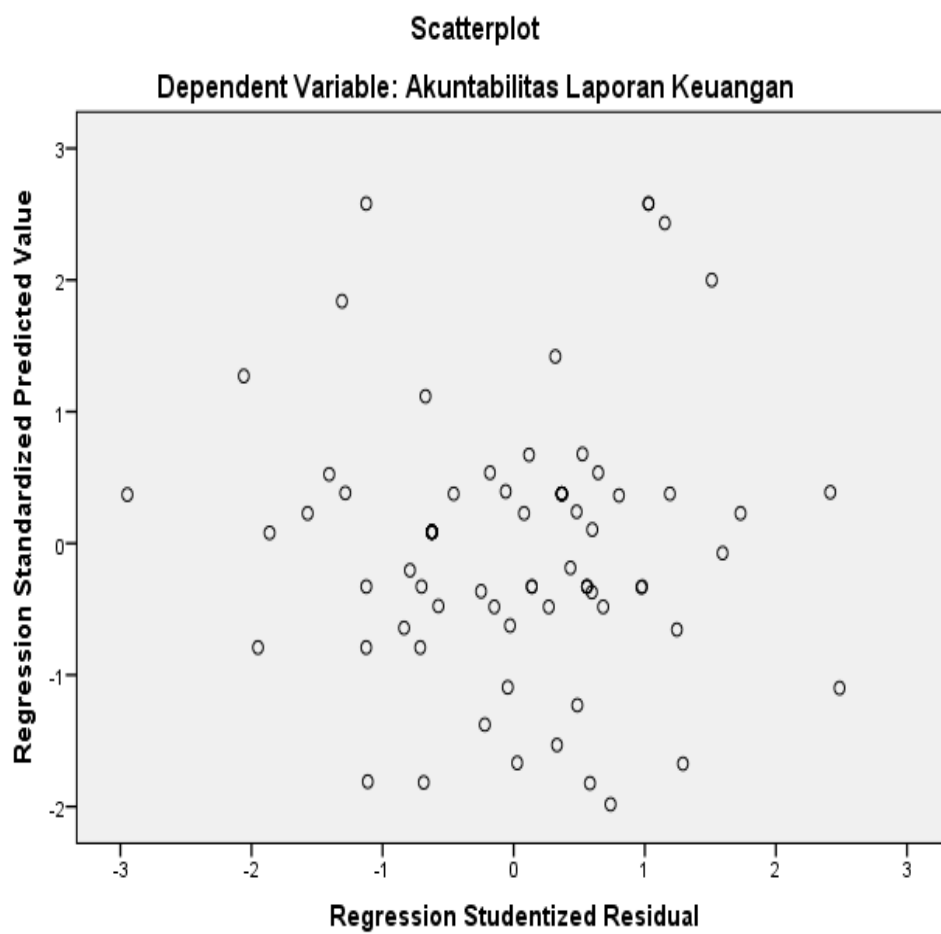


2. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	.251	.025				
1 Penyajian Laporan keuangan	.245	.047	.470	5.228	.000	.990	1.011
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.053	.010	.493	5.486	.000	.990	1.011

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

3. Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 13: Uji Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan keuangan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.645 ^a	.416	.400	.02450

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.031	2	.016	26.051	.000 ^b
1 Residual	.044	73	.001		
Total	.075	75			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan keuangan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Penyajian Laporan keuangan	Aksesibilitas Laporan Keuangan
1	1	2.944	1.000	.00	.00	.01
	2	.049	7.779	.02	.09	.84
	3	.007	19.992	.98	.91	.16

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan

Lampiran 14

Hasil Jawaban Responden

Responden	Varibel Y										Skor	Variabel X														
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)											Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)						Skor	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)			Skor				
Responden 1	4	4	5	4	3	4	4	4	4	3	39	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	35	4	4	4	12
Responden 2	5	3	4	4	4	5	4	4	5	5	43	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	40	5	5	5	15
Responden 3	5	3	4	4	3	4	5	3	3	2	36	5	5	3	3	3	4	3	4	4	4	34	4	4	5	13
Responden 4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	36	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	34	3	3	3	9
Responden 5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	15
Responden 6	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	12
Responden 7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	11
Responden 8	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	12
Responden 9	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	43	5	5	5	4	4	4	4	5	5	41	4	4	4	12	
Responden 10	5	4	4	5	3	4	4	3	4	4	40	1	2	3	3	3	3	3	2	4	24	3	4	3	10	
Responden 11	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	11
Responden 12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	11
Responden 13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	11
Responden 14	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	11
Responden 15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	11
Responden 16	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	46	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28	4	4	3	11	
Responden 17	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	11
Responden 18	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	44	5	3	3	4	3	4	3	3	3	31	4	4	3	11	
Responden 19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41	3	3	4	4	3	4	3	3	4	31	4	4	4	12	

Responden 45	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	11	
Responden 46	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	12
Responden 47	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	4	4	3	11
Responden 48	4	5	5	5	4	5	5	5	4	2	44	5	5	5	4	5	4	5	5	4	42	2	4	2	8
Responden 49	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	3	4	3	10
Responden 50	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	37	4	3	3	3	4	3	4	3	4	31	1	3	3	7
Responden 51	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	12
Responden 52	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	12
Responden 53	4	5	3	4	4	5	5	5	5	5	45	4	4	5	5	5	4	4	4	5	40	3	4	4	11
Responden 54	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	44	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	3	4	3	10
Responden 55	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34	4	4	4	12
Responden 56	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	40	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	12
Responden 57	4	5	5	4	3	4	4	4	4	2	39	4	4	3	4	3	3	4	4	3	32	1	4	3	8
Responden 58	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	4	4	4	12
Responden 59	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	39	4	4	4	3	4	3	4	4	4	34	3	3	3	9
Responden 60	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	43	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	2	2	2	6
Responden 61	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	44	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	2	2	2	6
Responden 62	4	4	5	5	4	4	4	4	3	3	40	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	2	2	2	6
Responden 63	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	42	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	2	2	2	6
Responden 64	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	43	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	2	2	2	6
Responden 65	4	4	5	5	5	4	4	4	3	3	41	4	4	5	5	5	5	5	5	3	41	2	2	2	6
Responden 66	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	42	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	2	2	2	6
Responden 67	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	43	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	2	2	2	6
Responden 68	4	4	5	5	3	4	4	4	3	3	39	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	2	2	2	6
Responden 69	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	36	3	4	4	3	4	4	3	4	4	33	1	2	3	6

Responden 70	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4	43	4	5	5	5	5	5	4	4	5	42	3	2	2	7
Responden 71	5	4	5	5	4	5	4	3	4	5	44	5	3	4	5	5	5	4	5	5	41	2	3	2	7
Responden 72	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	43	4	4	5	5	5	4	5	5	5	42	3	3	3	9
Responden 73	5	4	4	5	5	4	4	4	3	3	41	5	4	5	4	5	5	5	4	3	40	3	2	2	7
Responden 74	4	4	5	5	3	4	5	3	4	5	42	4	4	5	5	3	5	4	5	5	40	2	3	2	7
Responden 75	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	43	4	4	5	5	4	3	5	5	5	40	2	2	3	7
Responden 76	4	5	5	5	3	4	4	4	3	3	40	4	5	4	5	5	5	4	5	5	42	3	1	2	6